

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terselesaikan.

LKPJ merupakan salah satu bentuk kewajiban Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus sebagai sarana sinergitas bagi eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun.

Penyusunan LKPJ ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara substansi, bahwa pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam LKPJ ini merupakan hasil evaluasi dan refleksi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus selama satu tahun dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD atas segala kerjasama yang telah terbina selama ini dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Kudus, demikian pula saya sampaikan apresiasi untuk segenap jajaran Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten Kudus atas upaya kerasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus yang lebih baik.

Kudus, Maret 2021
Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR/FIGUR.....	iv
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1. Dasar Hukum.....	5
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	8
1.3. Data Umum Daerah.....	33
1. Data Geografis Wilayah.....	34
2. Jumlah Penduduk.....	38
3. Pertumbuhan Penduduk.....	41
4. Jumlah PNS.....	42
5. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan.....	45
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja.....	47
7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.....	48
BAB II.....	50
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	50
BAB III.....	70
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	70
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	70
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	285
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	395
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.....	401
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	404
3. Dinas Pertanian dan Pangan.....	406
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..	408
5. Dinas Perhubungan.....	410
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah ...	412
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	414
8. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH.....	417
9. Dinas Kesehatan.....	418
BAB IV.....	421
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	423
4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.....	423
4.1.1. Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang di terima dari pemerintah tingkat atasnya.....	424
4.1.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang di Berikan Kepada Tingkatan Pemerintah Bawahannya.....	426
4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	427
BAB V.....	428
PENUTUP.....	428

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	24
Tabel 1.2 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	38
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2020	39
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2020	40
Table 1.5 Komposisi Penduduk menurut <i>Dependensi Rasio</i>	40
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	41
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Penduduk	42
Tabel 1.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	43
Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Daerah.....	47
Tabel 1.10 Komposisi Realisasi Belanja.....	48
Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah.....	49

DAFTAR GAMBAR/FIGUR

Gambar 1.1	<i>Peta Kabupaten Kudus Berdasar Wilayah Kecamatan Tahun 2012-2032.....</i>	33
Gambar 1.2	<i>Peta Kabupaten Kudus Berdasar Kerentanan Tanah....</i>	35
Gambar 1.3	<i>Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Kudus.....</i>	38

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2020, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 untuk proyeksi tahun ketiga ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun dengan mekanisme baru dan sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Obyek laporan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2020, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 berikut perubahannya.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 23), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 42).

VISI DAN MISI BUPATI KUDUS

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

Bangkit.

Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern.

Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius.

Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang

mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas.

Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera.

Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.*

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal – hal baru. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan

teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Masyarakat yang kreatif dan inovatif merupakan masyarakat yang memiliki ide baru dan mampu menciptakan serta mengembangkan ide tersebut menjadi hal-hal baru. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. *Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.*

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. *Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.*

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. *Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.*

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi

regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/ TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok, sasaran pokok dan identifikasi permasalahan strategis dalam pembangunan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 – 2023. Untuk Tujuan Pokok Pembangunan meliputi :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;

3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan;
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran-sasaran pokok pembangunan di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama;
6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sedangkan Permasalahan strategis pemerintah daerah yang diidentifikasi meliputi :

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2020, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,00 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2020 sebesar 8,75 dan harapan lama sekolah tahun 2020 sebesar 13,23. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain:

a. Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia antara lain semakin lemahnya pemahaman terhadap budaya bangsa, nilai-nilai “ke-Bhineka Tunggal Ika-an” dan nasionalisme, serta semakin tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusifitas Kabupaten Kudus. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

b. Kesehatan

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi pada tahun 2020 yaitu 8,15 per 1000 kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi yaitu 72,90 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku

hidup bersih dan sehat.

2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2019 sebesar 68,19, untuk tahun 2020 nilai SAKIP belum di rilis dari Kementerian PANRB. Maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman.

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan pada tahun 2020. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 0,01 cenderung relatif stabil dan turun dari tahun 2019 sebesar 0,02. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,68% (58.000 jiwa) pada tahun 2019 menjadi 7,31% (64.240 jiwa) pada tahun 2020. Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 5%. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka di Kudus pada tahun 2020 sebesar 5,53%.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan

pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholders*, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

PROGRAM DALAM RPJMD

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah nomenklatur programnya mengacu pada regulasi dimaksud. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020, program-program daerah terinci sebagai berikut :

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
 - b) Program pendidikan non formal.

- 2) Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi
 - a) Program pelayanan kesehatan BLUD.
 - b) Program peningkatan kesehatan masyarakat.
 - c) Program pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - d) Program pelayanan dan sumber daya kesehatan.
 - e) Program upaya kesehatan masyarakat.
 - f) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata.

- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

- b) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
 - c) Program pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - d) Program pengembangan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - e) Program perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- a) Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
- a) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
 - b) Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum.
 - c) Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d) Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 6) Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Kesra Setda dan Kecamatan.
- a) Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial.
 - b) Program penanggulangan bencana daerah.
 - c) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - a) Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 - b) Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan.

- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - a) Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program peningkatan ketahanan pangan.
- 4) Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.
- 5) Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - a) Program pengendalian dan konservasi lingkungan hidup.
 - b) Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup.
 - c) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Program pelayanan pendaftaran penduduk
 - b) Program pelayanan pencatatan sipil
 - c) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Program peningkatan pemberdayaan masyarakat.
 - b) Program fasilitasi pemerintahan desa.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Program Keluarga Berencana.
- 9) Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
 - a) Program peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b) Program peningkatan keselamatan dan sarpras LLAJ.
- 10) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat DPRD

- a) Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi publik.
 - b) Program pengembangan teknologi dan sistem informasi.
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kecamatan
- a) Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 12) Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- a) Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
 - b) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - c) Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.
 - d) Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha.
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kecamatan dan Kelurahan.
- a) Program kepemudaan.
 - b) Program peningkatan kualitas dan sarana prasarana olahraga.
- 14) Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
- 15) Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) Program pengelolaan persandian
- 16) Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- a) Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
- 17) Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- a) Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi Perpustakaan.
- 18) Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

- a) Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan.

Urusan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
- 2) Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a) Program peningkatan dan pengembangan pariwisata.
- 3) Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan
 - b) Program peningkatan produksi sarana prasarana peternakan.
- 4) Energi dan sumber daya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
 - a) Program pelayanan perizinan pemanfaatan energy dan sumber daya mineral
- 5) Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan
 - a) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
 - b) Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen.
 - c) Program peningkatan pengelolaan pasar.
- 6) Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
- 7) Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi

Adapun program yang dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum yaitu :

- 1) Administrasi Pemerintahan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD.
 - a) Program fasilitasi tata pemerintahan
 - b) Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM

- c) Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi.
 - d) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
 - e) Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan
 - f) Program pengelolaan pengadaan barang/jasa
 - g) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
 - h) Program peningkatan kesejahteraan rakyat
 - i) Program penyelenggaraan kehumasan
 - j) Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat.
- a) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- 3) Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- a) Program perencanaan pembangunan daerah.
 - b) Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya
 - c) Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
- 4) Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- a) Program peningkatan pendapatan daerah
 - b) Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah.
 - c) Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah.
 - d) Program pengelolaan perbendaharaan daerah.
 - e) Program pengelolaan aset daerah.
- 5) Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- a) Program penyelenggaraan administrasi aparatur.
 - b) Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur.
 - c) Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur.
- 6) Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- a) Program penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Table 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
			Pemberian BOS dan beasiswa
			Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan
		Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular			

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan pembinaan kepemudaan Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan Peningkatan produksi dan produktivitas pangan Peningkatan pola konsumsi masyarakat Peningkatan perlindungan sosial Pemberian tambahan penghasilan tenaga pendidik keagamaan non PNS
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan manajemen perubahan Penataan perundang-undangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan ketatalaksanaan Penataan sistem manajemen SDM aparatur Penguatan pengawasan Optimalisasi pembangunan Zona Integritas

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi Penguatan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan Integrasi perencanaan dan penganggaran Optimalisasi monitoring dan evaluasi Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah Peningkatan kedisiplinan aparatur Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur Optimalisasi penerapan hasil inovasi Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan Peningkatan penyelenggaraan persandian Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Penguatan kebijakan internal SPBE Penguatan tata kelola SPBE Penguatan layanan SPBE Peningkatan diseminasi informasi
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman,	Meningkatnya ketertiban,	Peningkatan penegakan Perda Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi beragama umat	kehidupan demokrasi Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas ibadah Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar budaya
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan Pembangunan taman hutan raya Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil dan menengah Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah Peningkatan fasilitasi transmigrasi Peningkatan perlindungan konsumen Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online Peningkatan pengelolaan pasar Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan nilai realisasi investasi Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu Peningkatan pengelolaan pariwisata Peningkatan manajemen pertanahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman Penurunan luasan kawasan kumuh Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Pembangunan kawasan perdesaan Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
		Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan persampahan Peningkatan ruang terbuka hijau Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral Peningkatan jasa ekosistem

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pengertian terkait Prioritas Pembangunan Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah;
2. Program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan;
3. Merupakan agenda pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara (milestone) menuju sasaran 5 tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui rencana program pembangunan tahunan daerah;
4. Merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan agenda bupati dan hasil perumusan teknokratis terkait yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tidak semua program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal, sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang dijabarkan pada setiap misi. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan program yang mendukung pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas pendidikan;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program peningkatan kesehatan;
5. Program Pelayanan Kesehatan BLUD;
6. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
7. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
8. Program kepemudaan dan olah raga;
9. Program Kepemudaan;
10. Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga;
11. Program ekonomi kreatif pengolahan pangan;
12. Program peningkatan ketahanan pangan;
13. Program pemberdayaan perempuan;
14. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Program peningkatan kesejahteraan;
16. Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan social.

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintah yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

Guna peningkatan kinerja pelayanan publik diperlukan dukungan program dengan prioritas sebagai berikut :

1. Program pelayanan publik yang prima Program Pendidikan Menengah;
2. Program peningkatan transparansi anggaran;
3. Program perencanaan pembangunan daerah;
4. Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;
5. Program peningkatan pendapatan daerah;
6. Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah;
7. Program pengelolaan perbendaharaan daerah;
8. Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah;
9. Program pengelolaan aset daerah;
10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
11. Program manajemen pemerintahan yang modern.

Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

Upaya untuk mewujudkan program kehidupan yang lebih toleran yaitu:

1. Program pendidikan karakter
2. Program pemerataan dana CSR
3. Program fasilitasi tata pemerintahan
4. Program pemanfaatan zakat, infak sodaqoh
5. Program peningkatan kesejahteraan rakyat
6. Program sadar keberagaman
7. Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik
8. Program budaya dan adat
9. Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokasi dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Perlu adanya optimalisasi Pemerintah untuk mampu menciptakan kesejahteraan yang merata melalui program :

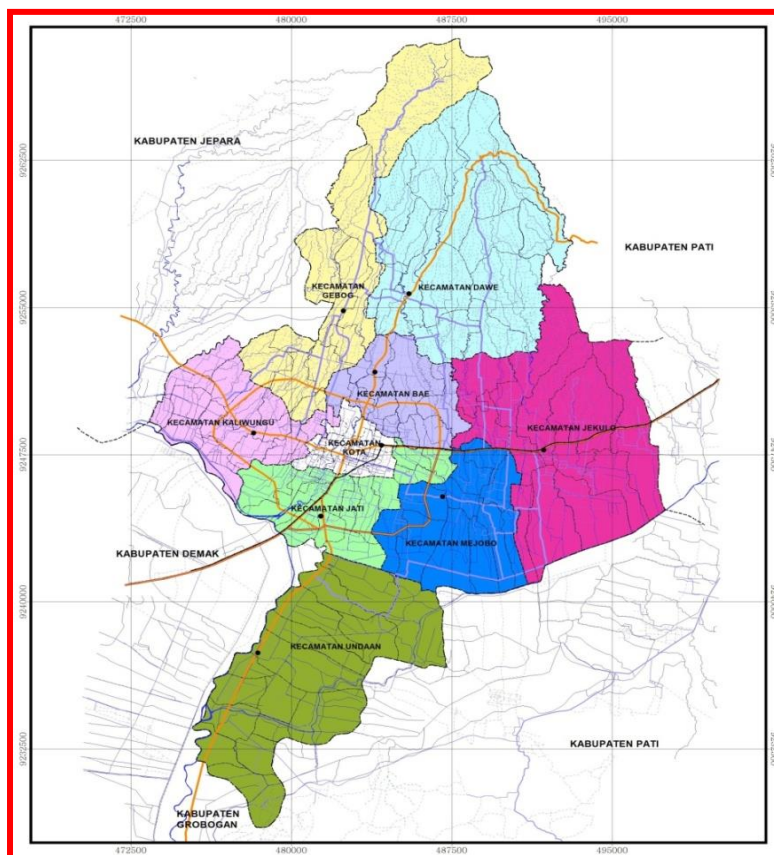
1. Program pemberdayaan ekonomi;
2. Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan;
3. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan;
4. Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan;
5. Program pemasaran hasil produk lokal;
6. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
7. Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen;
8. Program penguatan industri rakyat dan produktifitas kreatif;
9. Program akselerasi daya saing;
10. Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
11. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
12. Program pembangunan infrastruktur;
13. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
14. Program pembangunan berkelanjutan;
15. Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup.

DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 06°51' - 07°16' Lintang Selatan dan 110° 36' - 110°50' Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kudus Berdasar Wilayah Kecamatan
Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Tabel 1.2 Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Kudus 2020

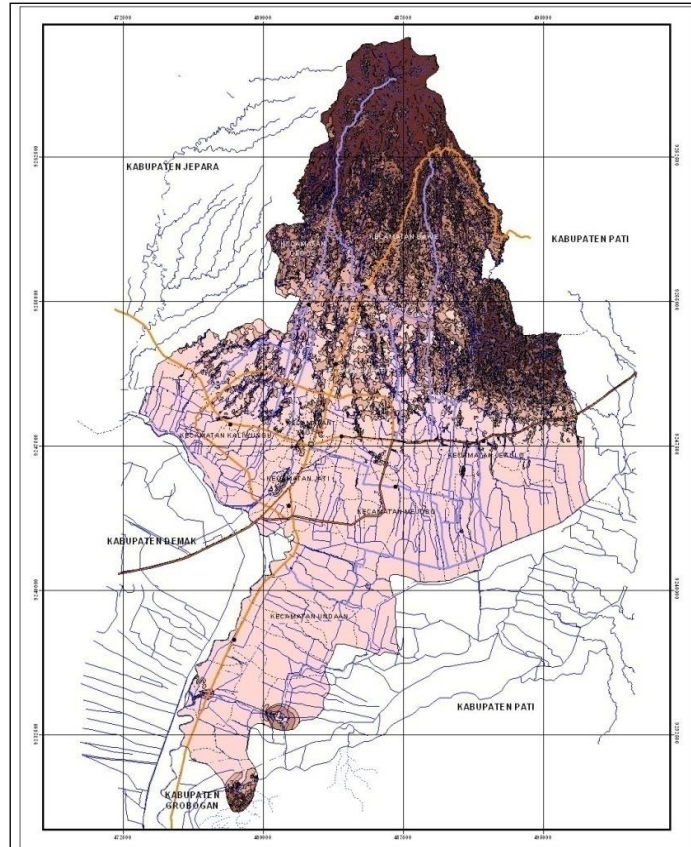
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jml Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dukuh	Jml RW	Jml RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	34	110	497
3	Jati	2.630	14	0	52	79	386
4	Undaan	7.177	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	445
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.506	11	0	80	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	71	110	583
Jumlah		42.516	123	9	434	716	3.771

Sumber : Kudus Dalam Angka 2020, Kecamatan Dalam Angka 2020

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.2, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 desa, 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT.

1. Data Geografis Wilayah

Tanah di Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40°, berdasarkan tingkat kemiringan di Kabupaten Kudus, kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)°, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)°, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)° serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°.



*Gambar 1.2 Peta Kabupaten Kudus Berdasar Kerentanan Tanah
Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032*

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, yaitu sebagai berikut :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sangat jarang atau tidak pernah terjadi adanya gerakan tanah. Pada zona ini mempunyai tebal tanah berkisar dari 0,5 – 4 m. Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan <15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasir dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga jarang terjadi adanya gerakan tanah. Bahkan bila kondisi kelerengan diganggu tidak akan membentuk gerakan tanah, karena tanah di daerah ini umumnya telah teguh. Gerakan tanah yang terjadi di jumpai di lereng-lereng sungai karena adanya gerusan aliran sungai.

Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar 0,3-5 m. Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai >50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

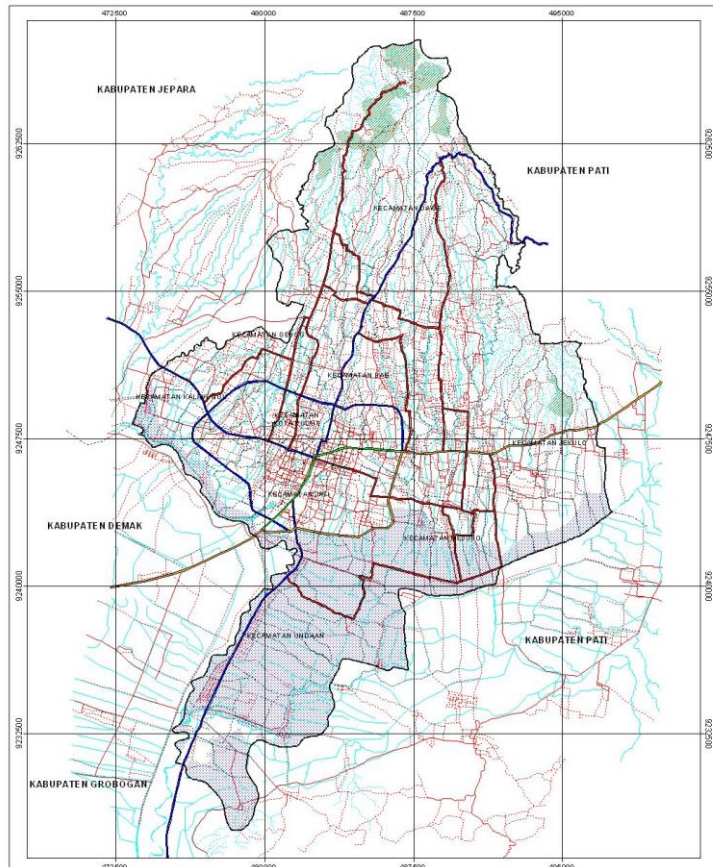
c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga kadang-kadang terjadi adanya gerakan tanah, bila kondisi kelerengan diganggu. Karena tanah di daerah ini umumnya sebagian masih merupakan tanah lepas-lepas yang menumpang di batuan dasarnya. Gerakan tanah dijumpai di lereng-lereng yang terjal dan mengarah ke lembah sungai. Penyebab gerakan tanah di zona ini umumnya disebabkan oleh kondisi tanah yang belum teguh dan gerusan air sungai yang membentuk tebing terjal dan kelerengan tinggi. Tebal tanah berkisar antara 0,5–10 m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir–Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sering terjadi adanya gerakan tanah. Gerakan tanah lama maupun baru akan sering terjadi. Faktor penyebab gerakan tanah di daerah ini karena kondisi tanah lapuk yang menumpang di batuan segar, kelerengan terjal dan sebagian terjadi karena adanya penggundulan hutan. Tebal tanah berkisar 0,3 ->5m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

Wilayah Kabupaten Kudus pada bagian utara merupakan wilayah dengan kelerengan 20% hingga lebih dari 45% yang didominasi jenis tanah latosol dan grumosol yang rawan longsor. Sedangkan wilayah bagian selatan relatif lebih datar, yang disusun oleh tanah alluvial yang bermanfaat bagi pertanian. Dengan kondisi ini menjadikan bagian selatan Kabupaten Kudus sebagai sentra pertanian yang subur. Wilayah pertanian ini rata-rata berada pada daerah cekungan yang merupakan pertemuan lembah Pegunungan Muria, Pegunungan Patiayam, dan Pegunungan Kendeng Utara, sehingga membuat daerah ini rawan terhadap bencana banjir. Wilayah Kabupaten Kudus yang rawan bencana banjir dan longsor seperti terlihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.3 Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Kudus
 Sumber : RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032

2. Jumlah Penduduk

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.2 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2020

Tahun	Laki - laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2016	413.317	49,78	416.904	50,22	830.221
2017	415.830	49,78	419.488	50,22	835.318
2018	419.212	49,23	432.266	50,77	851.478
2019	428.161	49,78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49,97	433.215	50,03	865.969

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2020 (Dinas Dukcapil)

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebanyak 428.161 orang atau 49,78% dan perempuan sebanyak 431.894 atau sekitar 50,22%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 865.969 orang dengan komposisi penduduk laki-

laki sebanyak 432.754 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 433.215 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki untuk tiap tahunnya.

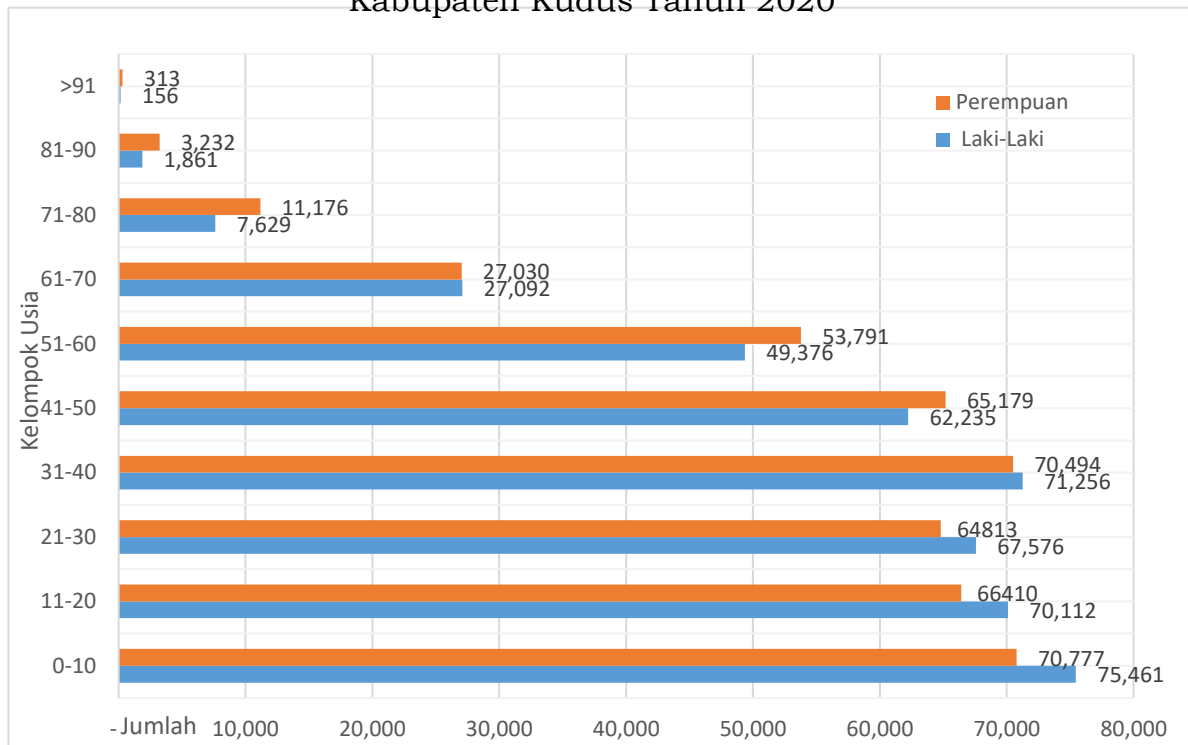
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2020

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-10	75,461	70,777	146,238
11-20	70,112	66,410	136,522
21-30	67,576	64,813	132,389
31-40	71,256	70,494	141,750
41-50	62,235	65,179	127,414
51-60	49,376	53,791	103,167
61-70	27,092	27,030	54,122
71-80	7,629	11,176	18,805
81-90	1,861	3,232	5,093
>91	156	313	469
JUMLAH	432,754	433,215	865,969

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2020 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola *Aging Population* pada suatu daerah yang dapat berdampak pada *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2020



Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2020 (Dinas Dukcapil)

Pada Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia lebih muda khususnya pada rentang usia 0-10 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 146.238 jiwa, sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 31-40 tahun sebesar 141.760 jiwa.

Table 1.5 Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2020

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2016	195.310	584.169	50.742	830.221	42,12
2017	190.543	592.830	51.945	835.318	40,90
2018	197.987	603.611	49.880	851.478	41,07
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40,65
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2020 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio

ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15 - 65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 41,05.

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.5.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2020

Tingkat pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak/Belum Sekolah	173,535	178.808	178.808	207.199	215.520
Tidak/Belum Tamat SD	61,547	65.291	65.291	63.716	64.338
Tamat SD/ sederajat	259,723	255.704	255.704	245.652	236.051
Tamat SLTP/ sederajat	145,002	144.251	144.251	144.957	146.140
Tamat SLTA/ sederajat	150,917	150.853	150.853	154.220	157.367
Akademi / Sarjana	39,497	40.411	40.411	44.311	46.553
Jumlah Penduduk	830,221	835.318	835.318	860.055	865.969

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2020 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 adalah pada jenjang Tamat SD/Sederajat yaitu 236.051 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi / Sarjana mengalami peningkatan 5.914 orang atau naik 8,08% dibandingkan tahun 2019.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Laju

pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah penduduk dasar tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak pertumbuhan penduduk berada di kisaran 0,69 % sampai dengan 1,23 %, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.7 di bawah ini.

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
2016	830.221	1,23
2017	835.318	1,19
2018	851.478	1,17
2019	860.055	1,01
2020	865.969	0,69

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2020 (Dinas Dukcapil)

Terlihat pada tabel 1.7 di atas bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun terus bertambah meskipun mengalami kecenderungan untuk melambat.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2020 pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 6.657, menurun dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2019 sebesar 7.140 orang Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 0,77 persen.

Adapun penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.8 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Tabel 1.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kudus Tahun 2020

NO	OPD/UNIT KERJA	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	7
2	BAGIAN HUKUM	12
3	BAGIAN PEREKONOMIAN	8
4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13
5	BAGIAN ORGANISASI	13
6	BAGIAN UMUM	35
7	SEKRETARIAT DPRD	30
8	BAPPEDA	34
9	BPPKAD	74
10	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	48
11	SEKRETARIAT KPU	1
12	INSPEKTORAT	32
13	DINAS SOSIAL, P3A, P2KB	39
14	DINAS PKPLH	173
15	DINAS NAKERPERINKOP UKM	51
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	70
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28
19	DINAS PERDAGANGAN	143
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	63
21	DINAS PMPTSP	30
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22
23	DINAS PERHUBUNGAN	84
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22
25	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	46
26	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	24
27	KECAMATAN KOTA KUDUS	29
28	KELURAHAN PURWOSARI	6
29	KELURAHAN SUNGGINGAN	7
30	KELURAHAN PANJUNAN	10
31	KELURAHAN WERGU WETAN	11
32	KELURAHAN WERGU KULON	9
33	KELURAHAN MLATI KIDUL	7
34	KELURAHAN MLATINOROWITO	7
35	KELURAHAN KERJASAN	7
36	KELURAHAN KAJEKSAN	8
37	KECAMATAN JEKULO	22
38	KECAMATAN GEBOG	27
39	KECAMATAN DAWE	28
40	KECAMATAN KALIWUNGU	22
41	KECAMATAN JATI	24
42	KECAMATAN UNDAAN	21
43	KECAMATAN MEJOBBO	26

NO	OPD/UNIT KERJA	JUMLAH
44	KECAMATAN BAE	25
45	DINAS KESEHATAN	91
46	UPT PUSKESMAS BAE	28
47	UPT PUSKESMAS DERSALAM	28
48	UPT PUSKESMAS DAWE	47
49	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	30
50	UPT PUSKESMAS GRIBIG	41
51	UPT PUSKESMAS JATI	34
52	UPT PUSKESMAS JEKULO	45
53	UPT PUSKESMAS JEPANG	39
54	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	38
55	UPT PUSKESMAS MEJOBBO	43
56	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	25
57	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	26
58	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	34
59	UPT PUSKESMAS REJOSARI	50
60	UPT PUSKESMAS RENDENG	28
61	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	27
62	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	36
63	UPT PUSKESMAS UNDAAN	48
64	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	32
65	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	117
66	SMP NEGERI 1 KUDUS	40
67	SMP NEGERI 2 KUDUS	47
68	SMP NEGERI 3 KUDUS	42
69	SMP NEGERI 4 KUDUS	39
70	SMP NEGERI 5 KUDUS	41
71	SMP NEGERI 1 JATI	38
72	SMP NEGERI 2 JATI	39
73	SMP NEGERI 1 BAE	36
74	SMP NEGERI 2 BAE	34
75	SMP NEGERI 3 BAE	34
76	SMP NEGERI 4 BAE	33
77	SMP NEGERI 1 JEKULO	39
78	SMP NEGERI 2 JEKULO	38
79	SMP NEGERI 3 JEKULO	35
80	SMP NEGERI 1 MEJOBBO	37
81	SMP NEGERI 2 MEJOBBO	38
82	SMP NEGERI 1 UNDAAN	28
83	SMP NEGERI 2 UNDAAN	35
84	SMP NEGERI 1 DAWE	23
85	SMP NEGERI 2 DAWE	29
86	SMP NEGERI 3 DAWE	10
87	SMP NEGERI 1 KALIWUNGU	39
88	SMP NEGERI 2 KALIWUNGU	40

NO	OPD/UNIT KERJA	JUMLAH
89	SMP NEGERI 1 GEBOG	37
90	SMP NEGERI 2 GEBOG	38
91	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOTA	280
92	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN JATI	293
93	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN UNDAAN	229
94	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAE	245
95	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN GEBOG	386
96	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DAWE	386
97	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KALIWUNGU	270
98	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN JEKULO	428
99	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN MEJOBBO	311
100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13
101	RSUD DR.LOEKMONOHADI	483
102	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13
103	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	16
104	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8
105	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	15
106	BAGIAN PEMERINTAHAN	11
JUMLAH		6.657

Sumber: BKPP Kabupaten Kudus Tahun 2020

5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

➤ Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bauran antara penugasan belanja (*expenditure assignment*) dan penugasan pendapatan (*revenue assignment*). Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui upaya-upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah perlu memastikan mempunyai sumber-sumber

pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (*sustainable revenue growth*) dalam rangka membiayai berbagai belanja daerahnya. Oleh karena itu, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya penanganan pandemi dan mendukung kondusifitas pelaksanaan berusaha.

Pada tahun 2020, sebagaimana disampaikan di awal, terdapat 2 (dua) buah Perda tentang APBD yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Untuk melaksanakan Perda APBD tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) Perbup mengenai Penjabaran APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Romawi V angka 28 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan-perubahan tersebut kesemuanya memiliki pengaruh pada struktur belanja dan sebagian memiliki pengaruh terhadap postur pendapatan.

Pada tahun 2020, realisasi total pendapatan mencapai Rp. 2.014.964.768.325,00 atau sebesar 102,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.967.081.016.390,00. Pendapatan tersebut paling besar bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.183.590.147.772,00; PAD sebesar Rp383.886.478.069,00; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 447.488.142.484,00. Realisasi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus terhadap Dana Perimbangan dengan proporsi sebesar 58,74% dari total pendapatan. Selanjutnya, kontribusi PAD adalah sebesar 19,05% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 22,21%. Secara rinci, pendapatan daerah kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.9 di bawah ini.

Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PENDAPATAN	1.967.081.016.390	2.014.964.768.325	102,43
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	291.643.884.000	383.886.478.069	131,63
Pendapatan Pajak Daerah	108.150.955.000	126.240.575.956	116,73
Hasil Retribusi Daerah	15.245.336.000	18.493.582.321	121,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.700.784.000	8.704.409.157	100,04
Lain-lain PAD yang Sah	159.546.809.000	230.447.910.635	144,44
Dana Perimbangan	1.206.873.864.390	1.183.590.147.772	98,07
Dana Bagi Hasil (DBH)	231.231.446.000	216.676.209.702	93,71
Dana Alokasi Umum (DAU)	764.591.304.000	757.097.370.000	99,02
Dana Alokasi Khusus (DAK)	211.051.114.390	209.816.568.070	99,42
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	468.563.268.000	447.488.142.484	95,50
Pendapatan Hibah	70.968.500.000	68.685.410.000	96,78
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	149.883.881.000	133.004.610.484	88,74
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.301.426.000	89.301.426.000	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	10.586.000.000	8.673.235.000	81,93
Pendapatan Lainnya	147.823.461.000	147.823.461.000	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

6. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Kebijakan Belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD. Sedangkan belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Adapun target dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.151.998.364.390,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.914.012.850.438,00 atau mencapai 89,21%. Realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan belanja langsung. Adapun komposisi realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel 1.10. berikut.

Tabel 1.10 Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.219.987.749.000	1.119.807.787.341	91,79
2.	Belanja Langsung	932.010.615.390	794.205.063.097	85,21
Jumlah		2.151.998.364.390	1.914.012.850.438	88,94

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Tampak dari perbandingan antara rencana Anggaran dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus dengan kemampuan pendapatan sebesar Rp.1.967.081.061.390,00 disandingkan dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp.2.151.998.364.390,00, maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai Rp. (184.917.348.000,00). Keadaan defisit tersebut selanjutnya dapat ditutup dari pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kudus.

7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang pada intinya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Struktur Pembiayaan

Sedangkan dilihat dari strukturnya, sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
 - Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - Pembayaran Pokok Utang

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.11 di bawah ini:

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020

NO	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan	190.917.348.000	190.936.848.788	99,98
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	190.917.348.000	190.917.348.813	99,98
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0	19.499.275	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	4.140.000.000	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000	4.140.000.000	100,00
	Pembiayaan Netto	184.917.348.000	186.796.848.788	99,98

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Kudus. Pandemi Covid-19 yang terjadi mengakibatkan pergeseran perilaku termasuk sosial ekonomi, baik makro maupun mikro, yang jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan menjadi sebuah krisis. Menurut Krugman (1999), ada tiga faktor utama pemicu krisis yang disebut sebagai lingkaran setan krisis (*vicious circle of crisis*), yaitu hilangnya kepercayaan dari para aktor perekonomian, turunnya indikator-indikator makroekonomi, dan masalah-masalah finansial di sektor perbankan, korporasi, maupun rumah tangga. Krisis bisa terjadi dari mana saja diantara salah satu faktor tersebut untuk kemudian menggulirkan efek domino yang menjalar ke faktor lain dan memunculkan krisis.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika perekonomian masa pandemi tersebut, pengelolaan keuangan daerah pun mengalami berbagai penyesuaian untuk menjaga kondisi fiskal daerah yang kredibel dan berkesinambungan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi sepanjang tahun 2020 tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019). Berdasarkan PP 12/2019, pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Adapun keuangan daerah dalam PP 12/2019 dijelaskan sebagai Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Berdasarkan PP 12/2019, terdapat 3 (tiga) pilar yang harus dijaga dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efisien serta upaya untuk menyelaraskan kapasitas Pemerintah Daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Agar penyelarasan pemerintahan terlaksana dengan efisien dan efektif serta mencegah tumpang tindih dalam pendanaan, disamping itu, dalam era otonomi daerah, setiap daerah didorong tidak hanya untuk tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, namun juga tanggap, kreatif, dan inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dilaksanakan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2019. Berdasarkan Perda tersebut, pada tanggal 23 Desember 2019 ditetapkan Perbup Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Setelah Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik disetujui, pada tanggal 28 Pebruari 2020 Perbup Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 yang juga menampung adanya Bantuan Gubernur dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berturut-turut setelah itu, untuk menanggapi dinamika penanganan Covid-19 telah ditetapkan:

1. Perbup Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Pebruari 2020. Perbup ini mengatur pergeseran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Dinas Kesehatan untuk penanganan Covid-19.
2. Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 24 Maret 2020. Perbup ini memuat pergeseran anggaran di SKPD yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19 (karantina pemudik) dan penambahan penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun sebelumnya) yang akan ditambahkan dalam belanja tidak terduga.
3. Perbup Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 18 Mei 2020. Perbup ini mengatur percepatan penanganan Covid-19, penyesuaian pendapatan dan belanja daerah (*recofusing*) berdasarkan penyesuaian pendapatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
4. Perbup Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ditetapkan tanggal 28 Juli 2020. Perbup ini mengatur penggunaan SILPA RSUD untuk

Covid-19, Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III untuk insentif tenaga kesehatan, alokasi cadangan DAK tahun 2020, dan Bantuan Gubernur.

Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2020, bersama dengan DPRD disepakati Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Perda tersebut diikuti dengan penetapan Perbup Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 8 Oktober 2020. Terakhir, pada tanggal 30 November 2020 ditetapkan Perbup Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 yang memuat pengaturan Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang IV untuk insentif tenaga kesehatan dan Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Periode Ketiga yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Penetapan kerangka legal kebijakan pengelolaan daerah tahun 2020 tersebut diarahkan agar kondisi yang ada tidak menjalar menjadi sebuah krisis ekonomi yang menurut Krugman (1999) bisa dicegah dengan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: mewujudkan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim usaha, mempertahankan kepercayaan pasar dan bisnis, meningkatkan program jaring pengaman sosial, menjaga tingkat suku bunga, memberikan kepastian hukum, dan menggiatkan edukasi publik. Langkah-langkah tersebut diwujudkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai kewenangannya dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, desentralisasi

fiskal di Indonesia merupakan bauran antara penugasan belanja (*expenditure assignment*) dan penugasan pendapatan (*revenue assignment*). Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui upaya-upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah perlu memastikan mempunyai sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (*sustainable revenue growth*) dalam rangka membiayai berbagai belanja daerahnya. Oleh karena itu, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya penanganan pandemi dan mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha.

Pada tahun 2020, sebagaimana disampaikan di awal, terdapat 2 (dua) buah Perda tentang APBD yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Untuk melaksanakan Perda APBD tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) Perbup mengenai Penjabaran APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Romawi V angka 28 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan-perubahan tersebut kesemuanya memiliki pengaruh pada struktur belanja dan sebagian memiliki pengaruh terhadap postur pendapatan.

Pada tahun 2020, realisasi total pendapatan mencapai Rp2.014.964.768.325,00 atau sebesar 102,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.967.081.016.390. Pendapatan tersebut paling besar bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp.

1.183.590.147.772,00; PAD sebesar Rp. 383.886.478.069,00; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 447.488.142.484,00. Realisasi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus terhadap Dana Perimbangan dengan proporsi sebesar 58,74% dari total pendapatan. Selanjutnya, kontribusi PAD adalah sebesar 19,05% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 22,21%. Secara rinci, pendapatan daerah kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
PENDAPATAN	1.967.081.016.390	2.014.964.768.325	102,43
Pendapatan Asli Daerah	291.643.884.000	383.886.478.069	131,63
Pendapatan Pajak Daerah	108.150.955.000	126.240.575.956	116,73
Hasil Retribusi Daerah	15.245.336.000	18.493.582.321	121,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.700.784.000	8.704.409.157	100,04
Lain-lain PAD yang Sah	159.546.809.000	230.447.910.635	144,44
Dana Perimbangan	1.206.873.864.390	1.183.590.147.772	98,07
Dana Bagi Hasil (DBH)	231.231.446.000	216.676.209.702	93,71
Dana Alokasi Umum (DAU)	764.591.304.000	757.097.370.000	99,02
Dana Alokasi Khusus (DAK)	211.051.114.390	209.816.568.070	99,42
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	468.563.268.000	447.488.142.484	95,50
Pendapatan Hibah	70.968.500.000	68.685.410.000	96,78
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	149.883.881.000	133.004.610.484	88,74
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.301.426.000	89.301.426.000	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	10.586.000.000	8.673.235.000	81,93
Pendapatan Lainnya	147.823.461.000	147.823.461.000	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan perpajakan kepada daerah mempunyai sifat *closed-list*. Hal itu berarti Pemda memiliki keleluasaan

dalam hal pemungutan atas pajak dan retribusi yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Adapun untuk pajak dan retribusi di luar yang ditetapkan dalam UU tersebut, Pemda dilarang memungut. Pada tahun 2020, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan mengalami sedikit kendala karena adanya pandemi Covid-19. Target pendapatan untuk beberapa akun mengalami penyesuaian akibat menurunnya potensi pendapatan yang berkaitan langsung dengan mobilitas sosial masyarakat seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan sebagainya. Namun demikian terdapat beberapa jenis pajak yang relatif tidak terdampak pandemi seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB P2, dan BPHTB.

Akibat kebijakan pembatasan sosial, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Penyesuaian tersebut antara lain adalah pengurangan aktivitas penagihan secara langsung ke lapangan dan pemberian insentif perpajakan. Namun demikian, upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tetap dilakukan antara lain melalui optimalisasi penagihan tanpa melalui kontak langsung, pemberian insentif untuk pemungut PBB P2 di desa, Lomba Kring PBB P2, dan lain sebagainya. Hal yang turut membantu, mulai pertengahan tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi Koordinator Wilayah VII (Korwil VII KPK) memberikan pendampingan dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan daerah. Pendampingan ini membuka perspektif dan semangat baru pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Kudus, sekaligus juga penataan ulang manajemen pendapatan daerah di Kabupaten Kudus.

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis pendapatan daerah. Hal-hal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020 dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk akun Pendapatan Pajak Daerah adalah:

1. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2 agar lebih mendekati harga pasar;

2. Penyusunan Perbup untuk pemberian insentif dalam rangka penanggulangan dampak bencana;
3. Penyusunan Perbup penyesuaian tarif Pajak Air Tanah;
4. Penyediaan fasilitas pelaporan Pajak Restoran (jasa boga instansi) secara online;
5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT PLN terkait rekonsiliasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terkait sinkronisasi data pertanahan dan data perpajakan daerah (BPHTB);
7. Pemasangan 50 alat perekam transaksi pajak daerah untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
8. Penerapan sistem konfirmasi status wajib pajak daerah melalui aplikasi SISWA-IPDA (Sistem Informasi Status Wajib Pajak Daerah) yang merupakan integrasi aplikasi perizinan pada DPMPTSP dengan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (SIMPATDA) dan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SIMPBB);
9. Perbaikan pengelolaan basis data pajak daerah;
10. Penyelenggaraan forum koordinasi dan evaluasi antar OPD yang menghasilkan penerimaan daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait pendapatan yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah adalah:

1. Penjajagan penggunaan *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) untuk pembayaran retribusi;
2. Pengurusan pengembalian hak atas aset-aset daerah;
3. Sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan penanaman modal;
4. Perbaikan pengelolaan basis data retribusi daerah;
5. Pemetaan dan penagihan retribusi untuk sekitar 250 orang juru parkir;
6. Penyusunan kajian kebijakan parkir berlangganan.

Untuk pendapatan yang bersumber dari hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun Lain-Lain PAD Yang Sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan karena semua akun pendapatan ini bersumber dari transfer baik dari Pusat (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa - TKDD) maupun dari Provinsi (Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Gubernur).

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Khusus pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah, secara khusus diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat daerah (*local taxing power*) guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa target PAD ditetapkan sebesar Rp. 291.643.884.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 383.886.478.069,00 atau 131,63%. Secara umum, komponen penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk semua jenis pendapatan. Komponen Lain-Lain PAD Yang Sah memiliki capaian tertinggi sebesar 144,44%, disusul kemudian Hasil Retribusi Daerah (121,31%), Pendapatan Pajak Daerah (116,73%), dan terakhir Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (100,04%).

Adapun jika dilihat berdasarkan kontribusinya sebagaimana pada Tabel 2.2 di bawah ini, struktur PAD Kabupaten Kudus TA 2020

didominasi oleh Lain-Lain PAD Yang Sah (60,03%) disusul Pendapatan Pajak Daerah sebesar 32,88%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 4,82%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 2,27%.

Tabel 2.2 Kontribusi Masing-Masing Jenis PAD Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Rp)	PROPORSI (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	383.886.478.069	100,00
Pendapatan Pajak Daerah	126.240.575.956	32,88
Hasil Retribusi Daerah	18.493.582.321	4,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.704.409.157	2,27
Lain-lain PAD Yang Sah	230.447.910.635	60,03

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

b. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah dalam APBDP TA 2020 ditetapkan sebesar Rp. 108.150.955.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp. 126.240.575.956,00 atau melampaui target dengan capaian sebesar 116,73%. Secara umum sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.3, kinerja realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan kecuali Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Penyebab tidak tercapainya Pajak MBLB adalah tidak adanya izin yang dikeluarkan untuk eksploitasi pada tahun 2020. Sedangkan untuk Pajak Sarang Burung Walet, penyebab tidak tercapainya adalah menurunnya produksi di beberapa lokasi yang selama ini menjadi tempat budidaya.

Table 2.3 Capaian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Pajak Hotel	1.059.358.000	1.312.432.724	123,89
Pajak Restoran	5.370.000.000	6.523.338.974	121,48
Pajak Hiburan	201.453.000	212.089.070	105,28
Pajak Reklame	2.505.750.000	2.997.822.309	119,64

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Pajak Penerangan Jalan	48.727.200.000	49.194.284.174	100,96
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.467.000	0	-
Pajak Parkir	296.158.000	316.317.140	106,81
Pajak Air Tanah	2.716.725.000	3.022.060.541	111,24
Pajak Sarang Burung Walet	17.844.000	10.159.240	56,93
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	25.105.000.000	32.401.844.658	129,07
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.132.000.000	30.250.227.126	136,68
Total Pendapatan Pajak Daerah	108.150.955.000	126.240.575.956	116,73

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

c. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 15.245.336.000,00 terealisasi sebesar Rp. 18.493.582.321,00 atau 121,31% dari target. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun perincian kinerja Retribusi Daerah adalah sebagaimana pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4 Capaian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Retribusi Jasa Umum	5.007.443.000	7.396.649.746	147,71
Retribusi Jasa Usaha	8.836.737.000	8.211.226.231	92,92
Retribusi Perizinan Tertentu	1.401.156.000	2.885.706.344	205,95
Hasil Retribusi Daerah	15.245.336.000	18.493.582.321	121,31

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Retribusi Jasa Umum dari target Rp. 5.007.443.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.396.649.746,00 atau sebesar 147,71% dari target. Dari 9 (sembilan) jenis Retribusi Jasa Umum hanya 3 (tiga) jenis yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman (95,00%) dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (50,13%).

Tabel 2.5 Capaian Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	660.525.000	1.504.026.585	227,70
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	2.520.000	2.394.000	95,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.908.891.000	956.876.000	50,13
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	108.768.000	212.942.500	195,78
Retribusi Pelayanan Pasar - Los	829.737.000	1.683.472.645	202,89
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	863.304.000	1.980.545.916	229,41
Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	16.170.000	45.570.000	281,82
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	60.000.000	189.720.000	316,20
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	557.528.000	704.729.600	126,40
Retribusi Tera/Tera Ulang UTTP	0	112.227.000	-
Retribusi Pengujian BDKT	0	145.500	-
Retribusi Sertifikasi dan Tabel	0	4.000.000	-
Retribusi Jasa Umum	5.007.443.000	7.396.649.746	147,71

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Dari Tabel 2.5 di atas terlihat bahwa Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman tidak mencapai target karena belum bisa dilakukan upaya jemput bola terhadap obyek retribusi karena data dukung pelayanan penguburan/pemakaman belum tersedia. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juga tidak memenuhi target. Rendahnya capaian retribusi ini dipengaruhi karena berkembangnya

ruko-ruko baru yang mempunyai lahan parkir sendiri dan lemahnya pengendalian/pengawasan atas juru parkir yang ada.

Retribusi Jasa Usaha dari target sebesar Rp. 8.836.737.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 8.211.226.231,00 atau sebesar 92,92% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi Jasa Usaha yang tidak memenuhi target, yaitu Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum (29,53%), Retribusi Tempat Khusus Parkir (56,85%), Retribusi Tempat Rekreasi (99,98%), dan Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga (61,54%). Tidak tercapainya target dari akun retribusi ini dikarenakan kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Hasil Retribusi Jasa Usaha yang terinci sebagaimana Tabel 2.6.

Table 2.6 Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha
Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.066.438.000	5.171.029.434	102,06
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	562.158.000	593.968.447	105,66
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	78.146.000	79.940.000	102,30
Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	94.965.000	28.043.500	29,53
Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	36.839.000	63.843.000	173,30
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0	70.000.000	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.915.625.000	1.089.094.600	56,85
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	79.506.000	85.675.000	107,76

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Retribusi Tempat Rekreasi	929.909.000	929.712.000	99,98
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	30.560.000	18.808.000	61,54
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.428.000	38.372.750	233,58
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4.052.000	11.150.000	275,17
Retribusi Rumah Potong Hewan	22.111.000	31.589.500	142,87
Retribusi Jasa Usaha	8.836.737.000	8.211.226.231	92,92

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Retribusi Perizinan Tertentu target sebesar Rp. 1.401.156.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.885.706.344,00 atau sebesar 205,95% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi Perizinan Tertentu dapat mencapai target antara lain karena gencarnya sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap penggunaan sistem online (OSS - *Online Single Submission*). Hasil Retribusi Perizinan Tertentu yang terinci sebagaimana **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7 Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.392.588.000	2.874.306.344	206,40
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	8.568.000	11.400.000	133,05
Retribusi Perizinan Tertentu	1.401.156.000	2.885.706.344	205,95

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 8.700.784.000,00 dari target sebesar Rp. 8.704.409.157,00 atau sebesar 100,04% dari target yang telah ditetapkan. Terlampauinya target pendapatan bersumber dari adanya hasil investasi pada PT PRPP. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian

laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta yang terinci sebagaimana **Tabel 2.8**.

Table 2.8 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.541.471.000	2.541.472.447	100,00
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma	1.442.265.000	1.442.265.176	100,00
PD BPR Bank Pasar	382.026.000	382.026.315	100,00
PD BPR BKK Kudus	717.180.000	717.180.956	100,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perbankan	6.159.313.000	6.162.936.710	100,06
Bank Jateng	6.159.313.000	6.159.312.537	100,00
PT PRPP	0	3.624.173	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.700.784.000	8.704.409.157	100,04

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

e. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 230.447.910.635,00 dari target sebesar Rp. 159.546.809.000,00 atau sebesar 144,44% dengan rincian sebagaimana dalam **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9 Capaian Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	353.600.000	3.386.607.098	957,75
Penerimaan Jasa Giro	3.999.992.000	5.731.615.651	143,29
Penerimaan Bunga Deposito	5.956.800.000	7.658.219.162	128,56
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	565.979.258	-

Pendapatan Pajak	Denda	158.400.000	725.160.508	457,80
Pendapatan Retribusi	Denda	24.000.000	55.187.350	229,95
Pendapatan Pengembalian	Dari	440.000.000	1.221.202.300	277,55
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		96.000.000	110.000.000	114,58
Pendapatan BLUD		148.518.017.000	210.745.663.947	141,90
Hasil dari pengelolaan dana bergulir		0	1.327.771	-
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya		0	246.947.590	-
Lain-Lain PAD Yang Sah		159.546.809.000	230.447.910.635	144,44

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

b. Dana Perimbangan

Target Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp. 1.206.873.864.390,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.183.590.147.772,00 atau sebesar 98,07%. Target dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan adalah sebagaimana **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10 Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil (DBH)	231.231.446.000	216.676.209.702	93,71
DBH Pajak	229.056.138.000	214.882.327.466	93,81
DBH Sumber Daya Alam	2.175.308.000	1.793.882.236	82,47
Dana Alokasi Umum (DAU)	764.591.304.000	757.097.370.000	99,02
Dana Alokasi Khusus (DAK)	211.051.114.390	209.816.568.070	99,42
DAK Fisik	33.399.453.000	31.997.975.877	95,80
DAK Non Fisik	177.651.661.390	177.818.592.193	100,09
Total Dana Perimbangan	1.206.873.864.390	1.183.590.147.772	98,07

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 468.563.268.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 447.488.142.484,00 atau sebesar 95,50% dari target. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah PDAM dan Hibah Dana BOS. Target dan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagaimana **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11 Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kudus TA 2020

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Pendapatan Hibah	70.968.500.000	68.685.410.000	96,78
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	149.883.881.000	133.004.610.484	88,74
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.301.426.000	89.301.426.000	100,0
Dana Insentif Daerah	10.586.000.000	8.673.235.000	81,93
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	147.823.461.000	147.823.461.000	100,0
Pendapatan Lainnya	70.968.500.000	68.685.410.000	96,78
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	468.563.268.000	447.488.142.484	95,50

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

➤ **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

Secara umum, pengelolaan pendapatan daerah TA 2020, serta belanja dan pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial tersebut berimbas pada turunnya potensi pendapatan daerah dan berkurangnya efektivitas penagihan pajak yang dilakukan. Secara

rinci, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Rendahnya NJOP PBB P2 dibandingkan dengan nilai pasar;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat baik selaku Wajib Pajak maupun sebagai Wajib Pungut dalam membayar pajak dan retribusi;
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perpajakan daerah;
- 4) Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak di daerah;
- 5) Pengelolaan sistem informasi yang kurang optimal;
- 6) Pengelolaan perusahaan daerah yang kurang profesional;
- 7) Dinamisnya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah;
- 8) Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah.
- 9) Realisasi penyerapan DAK tahun 2020 bidang kesehatan dan bidang pasar tidak bisa maksimal karena baru masuk dalam APBD Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 10) Realisasi Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pelayanan dan pembiayaan kesehatan tidak maksimal karena ada beberapa kegiatan fisik yang perlu dilakukan review ulang, sedangkan untuk kegiatan non fisik, pendampingan konsultan akreditasi harus menunggu jadwal dari konsultan yang padat sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi.
- 11) Belanja Tanah yang ditetapkan sebesar Rp.23.963.600.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.800.000.000,00 atau 3,34%. Tidak terealisasinya belanja tanah di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah karena belum adanya tindaklanjut permohonan tukar menukar tanah dari pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI terkait belum keluarnya ijin prinsip tukar menukar tanah.
- 12) Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 72.477.690.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.657.222.977,00 atau 86,45% antara lain yang tidak terealisasi karena tidak cukup waktu dalam proses pelelangan yang dialami sebagian besar SKPD.

b. Alternatif Solusi

Dari rumusan masalah yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Melakukan penyesuaian NJOP PBB P2 lebih mendekati harga pasar.
- 2) Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, layanan konsultasi, dan pembinaan secara berkesinambungan serta melaksanakan pendekatan secara terus menerus terhadap wajib pajak/retribusi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan di daerah salah satunya dengan sinkronisasi data pertanahan dan data perpajakan daerah, termasuk penerapan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (tapping box) dalam pengawasan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan;
- 5) Melakukan perbaikan dan peningkatan sistem informasi terkait pendapatan daerah;
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan BUMD;
- 7) Melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dana-dana transfer dan mengidentifikasi variabel-variabel penghitungan alokasi untuk memproyeksikan pendapatan transfer ke depan;
- 8) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar memberikan hasil yang optimal.
- 9) Meningkatkan ketertiban pengelolaan kegiatan DAK dan DBHCHT dari aspek fisik maupun administrasi serta jadwal pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan.
- 10) Dana pengadaan tanah dititipkan sebagai dana konsinyasi di pengadilan dan proses penggantian tanah warga melalui proses pengadilan dan Pengajuan ijin pada prinsipnya telah sampai kepada Menteri Kehutanan.

- 11) Kegiatan yang sumber dananya dari Bantuan Keuangan Provinsi tidak dapat diluncurkan, sedangkan untuk sumber dana APBD akan dicek ulang, apabila ternyata kegiatan tersebut menjadi prioritas maka akan diupayakan melalui perubahan anggaran 2020.
- 12) Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan kualitas serta akuntabilitas pembahasan KUA-PPAS hingga APBD.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan diantaranya melalui asas desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan umum dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dijabarkan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ditindaklanjuti dengan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sejumlah 24 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain urusan wajib sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten juga memiliki opsi untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan adalah sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus tertuang dalam Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana di bawah ini, yang antara lain memuat:

- Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan Pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Ringkasan Urusan Wajib

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, serta Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Urusan Pendidikan

Tabel 3.1
Dinas Pendidikan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
1.	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		93,76	Realisasi Anggaran dana BOS APBN perlunya Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat.	1. Peningkatan Kerjasama antar Bidang dan OPD Terkait dan selalu komunikasi dengan Pemerintah Pusat Terkait dana APBN	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan , evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	jumlah dokumen perencanaan OPD(Renstra, Renja, Renja Perubahan, bahan RKPD, bahan RKPD Perubahan, bahan KUA-PPAS, bahan KUA-PPAS Perubahan, IKU, RKT, PK, PK Perubahan, Renc Aksi)	12 Dok	12		2. Optimalisasi kerjasama disemua bidang dan OPD Terkait	
		jumlah dokumen pelaporan (LKPJ, LKJip, LPPD), Profil Pendidikan, SPM		5 Dok	5				
		jumlah dokumen evaluasi (evaluasi renja)		4 Dok	4				

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				jumlah sekolah yang berhasil sinkron dapodik	475 Skl	475			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	jumlah dokumen RKA,RKA Perubahan, DPA, DPPA, LKPD, laporan keuangan bulanan	17 Dok	17			
				jumlah pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, Bend Pengeluaran, Pembuat daftar gaji, Bend Pengeluaran Pembantu, Pemb Bend Peng BTL, Pemb Bend Peng BL, bend pengeluaran pembantu BTL, pengurus barang)	79 Org	79			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah sekolah yang kegiatan rutinnya dibantu pembiayaanya oleh Dikpora, sekolah yang sewa tanahnya dibayarkan APBD	5 Skl	5			
				jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat, SPIP, Laporan Aset, dan kepegawaian	4 Dok	4			
				jumlah PHD/K2/Outsorcing/Staf Pendukung Laporan/Tenaga Kebersihan/Tenaga Keamanan	40 Org	40			
				Jumlah Pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor	1 Pkt	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				jumlah gedung (dikpora/PBG/UP T Pendidikan kecamatan yang terehabilitasi / terbangun	5 Unit	5			
				jumlah fasilitasi peningkatan kompetensi ASN	1 Kgt	1			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja (Bangub)	jumlah sekolah yang berhasil sinkron dapodik	475 Skl	475			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI APK SMP/MTs Persentase sekolah terakreditasi A Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi		48,07			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	nilai rata-rata UN SMP	62	62			
				Nilai Rata-rata USBN SD	61	61			
				jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, jumlah sekolah yang menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan, jumlah sekolah yang terfasilitasi beasiswa kurang mampu, jumlah sekolah yang terfasilitasi lomba FLS2N, LCSPN, OSN, Lomba dokter kecil, LSS, lomba Perpustakaan, lomba MAPSI (tingkat	472 Skl	472			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				kecamatan, kabupaten dan provinsi), jumlah sekolah yang terfasilitasi pengembangan sekolah, dan jumlah sekolah terfasilitasi SPM Pendidikan Dasar					
				jumlah SMP yang terfasilitasi PPDB Online	27 Skl	27			
				jumlah sekolah yang dimerger	2 Skl	2			
				jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender pendidikan dasar	2 Dok	2			
				jumlah sekolah terakreditasi A	110 Skl	110			
			BOS APBN	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)	472 Skl	472			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			BOS APBD	jumlah sekolah penerima BOS APBD Kabupaten	472 Skl	472			
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	jumlah ruang kelas, laboratorium, ruang guru, UKS, perpustakaan, mushola, ruang serbaguna, tempat parkir yang dibangun dan direhabilitasi	104 Ruan g	104			
				jumlah sekolah yang dibangun pagar, jamban, lapangan upacara, lapangan olahraga	70 Skl	70			
				jumlah pengadaan mebelair dan alat peraga	35 Pkt	35			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	138 Ruan g	138			
				Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) : Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium komputer Terlaksananya pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Terlaksananya pengadaan alat kesenian tradisional	56 Pkt	56			
				Pembangunan perpustakaan sekolah	2 Pkt	2			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				Pembangunan ruang kelas SD dan SMP	13 Ruan g	13			
				Pembangunan Jamban / Sanitasi SD dan SMP	28 Ruan g	28			
			Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non pns di SD dan SMP yang mendapat tunjangan	2630 Org	2630			
				jumlah jurnal profesionalisme pendidik	11 Dok	11			
				jumlah guru sd,smp dan pengawas berprestasi, calon kepala sekolah yang di seleksi, nilai angka kredit, mengikuti pelatihan	3379 Orh	3379			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				jumlah guru tersertifikasi	3300 Org	3300			
			Program Pendidikan Non Formal	APK PAUD APK Pendidikan Kesetaraan Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi pendidik		94,11			
			Fasilitasi dan	Jumlah dokumen pedoman	1 Dok	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	penyusunan kalender PAUD					
				Jumlah PAUD yang mendapatkan BOP, jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana, jumlah PAUD terehabilitasi, jumlah PAUD yang terfasilitasi pengembangan PAUD, jumlah PAUD terfasilitasi SPM Pendidikan Anak Usia Dini	436 Lemb ar	436			
				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan festival gebyar PAUD dan lomba lomba, peserta yang mengikuti kegiatan Bunda	790 Org	790			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				PAUD					
				Jumlah PAUD yang menerapkan kurikulum 2013, PAUD HI, jumlah PAUD terakreditasi, PAUD yang ikut lomba gugus	300 Org	300			
			Fasilitasi BOP Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	Jumlah PAUD Negeri penerima BOP	3 Lemb aga	3			
			Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Jumlah warga buta aksara yang mengikuti pembelajaran, orang yang mengikuti pendidikan kecakapan hidup	160 Org	160			
				Jumlah lembaga PNF yang terakreditasi	8 Lemb aga	8			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				Jumlah penyelenggara kejar paket, lembaga peserta peringatan HAI	24 Lemb aga	24			
				jumlah tutor yang mengikuti pengembangan kurikulum PNF	50 Org	50			
				jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang melaksanakan USBN, UNBK, terfasilitasi pengembangan Pendidikan Masyarakat, dan terfasilitasi SPM Pendidikan Kesetaraan	25 Lemb aga	25			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender Pendidikan Masyarakat	1 Dok	1			
			Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	jumlah lembaga PAUD dan PNF yang mengisi dapodik	500 Lembaga	500			
				jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi	250 Org	250			
				jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non pns di PAUD yang mendapat tunjangan	1830 Org	1830			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/ Outcome	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
				- jumlah pendidik PAUD yang tersertifikasi	410 Org	410			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bidang Pendidikan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.1.tampak bahwa dalam pelaksanaan urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 636.772.342.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 580.011.055.440.
- Permasalahan:
 - a. realisasi anggaran dana BOS APBN perlunya rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat.
- Solusi:
 - a. Peningkatan Kerjasama antar Bidang dan OPD Terkait dan selalu komunikasi dengan Pemerintah Pusat Terkait dana APBN.
 - b. Optimalisasi kerjasama disemua bidang dan OPD Terkait.

2. Urusan Kesehatan

Tabel 3.2
Dinas Kesehatan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
2.	Dinas Kesehatan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	-	88,29	Karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan tertunda atau tidak bisa dilaksanakan		

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	19 Dok	19			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	7 Dok	7			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur kantor yang terpelihara	139 Unit	139			
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar		6 Dok	6				
		Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya		0 Org	65				
		Jumlah tenaga non pns (honorar dan tenaga pelaksana kegiatan)		51 Org	51				
			Peningkatan kapasitas sumber daya	Terselenggaranya Pendidikan Serta Pelatihan Formal dan	118 Org	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			dan sarana prasarana aparatur (DBHCHT)	Non Format					
			Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat					
			Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	900 Bumil	450			
				Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan	550 Balita	300			
				Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	4950 Balita	2500			
				Jumlah ibu hamil yang mendapat TTD	16910 Bumil	5640			
				Jumlah remaja puteri yang mendapat TTD	22230 Siswa	7400			
				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16982 Bumil	10347			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16210 Ibu Bersalin	9999			
				Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar	15439 bayi	9847			
				Jumlah balita yang mendapat pelayanan sesuai standar	76970 Balita	42514			
			Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK Non Fisik)	Peningkatan upaya promotif dan preventif	9 Kec	9			
			Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DBHCHT)	Jumlah ibu hamil yang mendapat makanan tambahan	900 Bumil	450			
		Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan		550 Balita	300				
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar		16982 Bumil	10347				

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	15439 Ibu Bersalin	9999			
				Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	15439 Bayi	9847			
				Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	76970 Balita	42514			
			Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	132 Desa/Kel	132			
		Jumlah desa/ kelurahan ODF		133 Desa/Kel	132				
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dasar		19 Pusk	19				
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga pada kelompok masy di wilayah kerjanya		19 Pusk	19				

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	705 Lok	493			
				Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	780 Lok	495			
				Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	53 Lok	29			
				Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani	0 Org	-			
			Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK Non FISik)	Upaya peningkatan promotif dan preventif kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	9 Kec	9			
			Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	34.954 Siswa	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				standar di sekolah/ madrasah					
				Jumlah santri yang dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	537 Santri	1078			
				Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	105 Desa/Kel	105			
				Jumlah desa siaga aktif mandiri	19 Des/Kel	38			
				Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4 Kali	4			
			Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan (DAK Non Fisik)	Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat	9 Kec	9			
			Fasilitasi Promosi dan	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan	105 Desa/Kel	132			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Pemberdayaan Kesehatan (DBHCHT)	kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader					
				Jumlah desa siaga aktif mandiri	19 Des/Kel	38			
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL		80,71			
			Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana	Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	14725 Bayi	9834			
				Jumlah desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	132 Des/Kel	132			
				Jumlah Kejadian luar Biasa (KLB)/ wabah ditanggulangi <24 jam	2 Kejadian	2			
				Jumlah penemuan dan penanganan AFP	4 Kasus	2			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana (DAK Non Fisik)	Peningkatan upaya promosi dan preventif penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I	9 Kec	2			
			Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana (DBHCHT)	Jumlah desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	132 Des/Kel	132			
			Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10430 Kasus	3494			
		Jumlah penderita TBC yang diobati dan dilaporkan		1931 Kasus	730				
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		19082 Kasus	570				

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				Kasus baru DBD yang mendapatkan penanganan	100%	100			
				Jumlah sasaran lokasi penanganan dan penanggulangan DBD	60 Lok	45			
			Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Fisik)	Jumlah orang terduga Tuberculosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10430 Kasus	3494			
				Jumlah penderita TBC (semua kasus) yang diobati dan dilaporkan	1931 Kasus	730			
			Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Non Fisik)	Peningkatan upaya promosi dan preventif penyakit menular	9 Kec	9			
			Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10430 Kasus	3494			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Penyakit Menular (DBHCHT)	Jumlah penderita TBC yang diobati dan dilaporkan	1931 Kasus	730			
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19082 Kasus	3816			
				Persentase penanganan penderita DBD	100%	100			
			Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah usia produktif (15-59 th) yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	571109 Org	54089			
				Jumlah usia lanjut (≥ 60 th) mendapat layanan skrining kesehatan sesuai standar	86891 Org	25961			
				Jumlah penderita hipertensi (usia ≥ 15 th) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228984 Org	48578			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				Jumlah penderita DM usia >=15 th yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17766 Org	16537			
				Jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar \	10184 Org	1087			
			Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)	Jumlah usia produktif (15-59 th) yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	571109 Org	28355			
			Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (DBHCHT)	Penanggulangan Covid-19	9 Kec	9			
			Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan		80,98			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan (UHC)	95818 Org	54248			
				Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan kesehatan P3K	750 Kgt	314			
				Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	5 Pusk	5			
				Jumlah pembangunan Rumah Sakit tipe D	0 Unit	-			
				Jumlah klinik yang terakreditasi	0 Unit	-			
			Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DAK Fisik)	Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	5 Pusk	5			
			Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya reakreditasi puskesmas	14 Pusk	-			
				Terlaksananya PIS PK	9 Kec	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan (UHC)	151412 Org	54248			
				Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	5 Pusk	-			
				Pembangunan Rumag Sakit Tipe D	0 Unit	-			
			Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kimia, BHP, dan BMHP	5 Jenis	2			
				Jumlah lokasi dilakukan pengendalian dan pemantauan obat	20 Lok	20			
				Jumlah item obat dan perbekalan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	161 Item	161			
			Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DAK Fisik)	Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kimia, BHP dan BMHP	5 Jenis	2			
				Jumlah item obat dan perbekalan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	161 Item	161			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)	Pemantauan dan distribusi obat	20 Lok	10			
			Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kiiia, BHP dan BMHP	5 Jenis	2			
				Jumlah item obat dan perbekalan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	161 Item	161			
			Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Jumlah sertifikat perijinan	1200 Lbr	900			
				Jumlah pemeliharaan jaringan komputer, jaringan SIK, jaringan Sipedu dan sistem aplikasi Dinas Kesehatan	5 aplikasi	3			
				Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	2 Dok	2			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				Jumlah pengelola industri Rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan	100 IRT	50			
				Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan menjadi nakes teladan	9 Jenis	9			
			Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi (DAK Non Fisik)	Pemantauan perijinan obat dan makanan	9 Kec	9			
			Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke Labkesda	5627 Org	3,000			
			Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Jumlah indikator SPM yang tercapai 100%	12 Item	7			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	Peningkatan upaya promotif dan preventif di puskesmas	19 Pusk	19			
			Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah indikator SPM yang tercapai 100%	12 Item	7			
			Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas	652364 Org	424126			
			Pelayanan Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 (BOK Tambahan)	Jumlah pemenuhan insentif bagi Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1 Thn	1			
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.		Program pengadaan, peningkatan sarana dan	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan		30,77	Adanya pandemi dan rasionalisasi anggaran	1. Pelaksanaan kegiatan DBHCHT pembangunan	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
	Loekmono Hadi		prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata				sehingga serpan untuk dana DBHCHT sangat rendah	Gedung IBS akan dilaksanakan pada tahun 2021.	
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Tersedianya alat - alat kesehatan	71 Unit	71		2. Kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2020 akan diajukan pada tahun berikutnya.	
			Pembangunan/ rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	71 Unit	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
			Pembangunan/ rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Cakupan ketersediaan Management kontruksi untuk pembangunan gedung IBS (Instalasi Bedah Sentral)	1 Pkt	1			
			Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan BLUD		106,0 3			
			Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang dilayani tenaga	111929 Pasien	90803			
				Jumlah kunjungan pasien rawat inap yang dilayani tenaga	24467 Pasien	16272			
				Jumlah asuhan keperawatan pasien rawat jalan yang dilayani oleh perawat sesuai SPM	111929 Pasien	90803			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MEND ASI DPRD
				Jumlah asuhan keperawatan pasien rawat inap yang dilayani oleh perawat sesuai SPM	22112 Pasien	16272			
				ketersediaan alat kesehatan di RS	61 Unit	213			
				Akuntabilitas kinerja sesuai standart	54 Dok	38			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.2 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.284.153.390 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 386.738.176.294.
- Permasalahan:
 - a. Adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan tertunda atau tidak bisa dilaksanakan.
 - b. Adanya pandemi dan rasionalisasi anggaran sehingga serpan untuk dana DBHCHT sangat rendah.
- Solusi:

- a. Peningkatan atau percepatan manajemen pelaksanaan dan pelaporan Peningkatan atau percepatan manajemen pelaksanaanterutama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban kegiatan, peningkatan monitoring proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Proses yang berkaitan dengan pekerjaan lelang atau pengadaan bisa dimulai pada awal tahun sehingga proses pelaksanaan pekerjaan bisa dilaksanakan awal tahun juga.
- c. Pelaksanaan kegiatan DBHCHT pembangunan Gedung IBS akan dilaksanakan pada tahun 2021.
- d. Kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2020 akan diajukan pada tahun berikutnya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan Pembanguna n Struktur Perekonomi an Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah an	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah			Proses perubahan anggaran yang terlalu mepet dan faktor alam		

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pelaporan	6 Dok	6			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	11 Kgt	11			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	12 Dok	12			
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik		75,75			
			Pengadaan alat-alat berat	- Terlaksananya Pengadaan alat berat	1 Unit	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan	- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeli haraan alat-alat berat+	2 Pkt	2			
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik		91,34			
			Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeli haraan jaringan irigasi dan normalisasi saluran sungai	12 Pkt	11			
			Rehabilitasi/Pem eliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan	- Terlaksananya rehabilitasi/pemeli haraan talud/bronjong	6 Pkt	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Lainnya						
			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)	- Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi	4 Pkt	4			
			Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I	- Terlaksananya Pemeliharaan rutin UPTD pengairan Wilayah I	2 PKT	2			
			Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II	- Terlaksananya pemeliharaan rutin UPTD pengairan wilayah II	2 pKT	2			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya (DBHCHT)	- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan normalisasi saluran sungai (DBHCHT)	22 Pkt	22			
			Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya (DBHCHT)	- Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber daya Air dan Jaringan Pengairan lainnya (DBHCHT)	6 Pkt	6			
			Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap		81,56			
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan	- Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan	49 Pkt	49			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Jalan dan Bangunan Pelengkap	haraan Jalan dan Bangunan Pelengkap					
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap (Bangub)	- Terlaksananya Pembangunan Jalan	1 Pkt	-			
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	- Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan jembatan	9 Pkt	9			
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan (Bangub)	- Terlaksananya Pembangunan Jembatan	1 Pkt	-			
			Pembangunan/R ehabilitasi/Pemel iharaan Jalan dan Bngunan Pelengkap (DBHCHT)	- Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Bangunan Pelengkap (46 Pkt	46			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				DBHCHT)					
			Pembangunan/R ehabilitasi/Pemel iharaanJembatan (DBHCHT)	- Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan jembatan (DBHCHT)	2 Pkt	2			
			Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat persentase penduduk berakses air minum persentase rumah tinggal bersanitasi		86,84			
			Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	- Terlaksananya pembangunan/Pe ngkatan infrastruktur	43	43			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi	-	-			
				- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-			
				- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	-	-			
			Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	- Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	4 Pkt	4			
			Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (DBHCHT)	- Terlaksananya Pembangunan/peningkatan infrastruktur (DBHCHT)	8 Pkt	8			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase (DBHCHT)	- Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase (DBHCHT)	23 Pkt	23			
			Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase ketaatan rencana tata ruang		73,6			
			Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	- Terlaksananya Perencanaan dan pemanfaatan ruang	1 Pkt	1			
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	1 Pkt	1			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.3 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam

penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.224.703.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 133.487.956.289.

- Permasalahan
 - a. Proses perubahan anggaran yang terlalu mepet dan faktor alam
- Solusi
 - a. Percepatan pelaksanaan proses kegiatan

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tabel 3.4
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		98,2	-	-	
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD yang tersusun sesuai standar	17 Dok	17			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	13 Dok	13			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai standar	6 Dok	6			
				Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian OPD yang tersusun sesuai standar	3 Dok	2			
				Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	3			
				Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	5 Org	5			
				Jumlah pegawai honorer daerah (PHD) dan tenaga kontrak yang terbayar	63 Org	63			
				- Jumlah sarpras yang terpelihara	350 Unit	350			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program Pengembang an Perumahan dan Kawasan Permukiman	cakupan ketersediaan rumah layak huni persentase lingkungan permukiman kumuh		96,72			
			Pembinaan, pengendalian dan peningkatan	Luas kawasan kumuh yang tertangani	2,70 Ha	0,29			
			pembanguna n perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah fasilitasi peningkatan rumah tidak layak huni	195 Unit	290			
			Pembanguna n dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	128 Unit	127			
			Pembanguna n dan pengembang an sarana	Persentase LPJU yang berfungsi baik	80%	80			
			prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rusunawa dalam kondisi layak huni	2 Bln	4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL		70,73			
			Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (DBHCHT)	- Operasional penanganan covid-19	30 Hari	30			
				- Pengadaan perlengkapan dan peralatan covid-19	30 Hari	30			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.4 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.410.360.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 58.078.000.082.
- Permasalahan: -
- Solusi: -

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TABEL 3.5
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		86,7	-	-	
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar	15 Dok	15			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	29 Dok	29			
			Peningkatan kapasitas sumber daya	Jumlah sarpras yang dikelola	11 Unit	11			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	16			
				- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	62 Dok	62			
				- Jumlah ASN yang kompeten	1 Org	1			
			Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	persentase potensi konflik sosial yang tertangani persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani persentase potensi konflik SARA yang tertangani		86,4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Optimalisasi kewaspadaan nasional dan pendidikan politik masyarakat	- Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang deteksi dini dan cegah dini gangguan keamanan	250 Org	95			
				- Jumlah Parpol yang paham administrasi bantuan keuangan Parpol	10 Orgn	10			
				- Jumlah peserta Sosialisasi yang faham tentang pendidikan politik	150 Org	400			
			Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi	- Jumlah upacara hari besar nasional yang difasilitasi	6 Kali	3			
				- Jumlah peserta sosialisasi yang paham tentang wawasan kebangsaan dan antisipasi terhadap	350 Org	605			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				kegiatan kelompok radikal					
			Peningkatan ketahanan nasional	- Jumlah peserta pembinaan yang faham tentang kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan dan persaudaraan bangsa Indonesia	150 Org	120			
				- Jumlah anggota Ormas/LSM yang faham tentang tugas dan fungsinya	75 Org	50			
				- Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	75 Org	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya ketertiban, keamanan & kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	- Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum (Indikator :	78%	100%	Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	Meningkatkan upaya sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	
			- Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	12 dokumen	12 dokumen	- Banyak orang cenderung membangun sebelum IMB keluar - Adanya Kafe karaoke hall dan room masih operasional secara kucing-kucingan walau sudah dilarang di Kabupaten Kudus	- IMB tower dll keluar lama - Tidak ada perbedaan yang mengatur kafe karaoke hall dan karaoke yang room padahal karaoke hall dibutuhkan untuk hiburan yang tidak mengandung unsur negative /	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya galian c yang operasional - Banyaknya pengemis, anak jalanan (PGOT) yang masih beraktifitas ditempat umum / jalan - Masih banyaknya PKL yang mengganggu ketertiban umum 	<p>asusilanya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban galian c bukan kewengan pol pp Kabupaten tetapi kewenangan pemerintah prov Jawa Tengah - Kurangnya dukungan solusi dari dinas teknis terhadap hasil penertiban oleh Satpol PP - Karena saat ini Perda yang mengatur PKL belum ada juklaknya sehingga Pol PP kesulitan untuk menertibkan karena belum adan zonasi yang mengaturnya 	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya peredaran dan konsumsi miras di sebagian wilayah Kab Kudus - Masih banyaknya orang membuang sampah tidak pada tempatnya. - Masih banyak terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena penerapan hukuman di pengadilan belum maksimal - Tidak patuh pada aturan sehingga lebih memudahkan membuang sembarangan - Adanya pihak Hotel yang masih menerima tamu lawan jenis yang tidak mempunyai ikatan pernikahan dalam 1 kamar. 	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						pelanggaran operasional Hotel.		
			- Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	12 dokumen	12 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya tenaga PPNS - Semakin banyaknya upaya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menggunakan fasilitas daring / media sosial sehingga menyulitkan upaya penyelidikan - Adanya masyarakat yang melanggar Perda/Perkada dengan dalih 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan tenaga PPNS dan mengusulkan penambahan tenaga PPNS - Berupaya Menambah kemampuan anggota dalam pemantauan media social - Mengupayakan 	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						pandemi Covid-19	n peningkatan kesadaran masyarakat mematuhi Perda/Perkada tentang Trantibum	
			- Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	65%	85%	Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meningkat dikarenakan tingkat kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah	Meminimalisir Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan jalan mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			- Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	<p>- Dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus jumlah PKL semakin bertambah</p> <p>- Dengan berkembang dan cepatnya informasi lewat handphone maka anak-anak jalanan, anak punk, pengemis dan ODGJ semakin membar lintas daerah untuk berkumpul sehingga mengakibatkan peningkatan Pelanggaran PGOT di Kabupaten Kudus</p>	<p>- OPD terkait yang membidangi PKL lebih aktif dalam penegasan dan pembinaan terhadap PKL sehingga Satpol PP bisa focus pada tugas penegakan perda</p> <p>- OPD terkait yang membidangi agar membuat sosialisasi berupa baliho terkait perda Nomor 15 tahun 2017 tentang Penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sehingga di lapangan bisa menindak bukan hanya PGOT tetapi juga yang memberi.</p>	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
							<ul style="list-style-type: none"> - OPD yang menangani perijinan / retribusi agar rutin berkala memberikan data-data reklame yang berijin. - Kecamatan-kecamatan lebih berperan dalam penertiban reklame liar. - Agar tiap desa bisa menyediakan lahan TPS dengan difasilitasi OPD terkait. 	
			- Kegiatan Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen	- Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan belum tersedianya TPS di masing-	- Mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi terhadap gangguan tibus tranmas	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			dan Ketentraman Masyarakat			masing Desa / Kecamatan sehingga Pelanggaran Pembuangan sampah dan limbah semakin meningkat - Galian C, Parkir Liar, Kafe, Tindakan Mesum, IMB, Tawuran, Bolos sekolah, kebakaran, Pemerasan, Unjuk rasa, Pergurukan lahan juga	- Mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi terhadap gangguan tibum tranmas	
			- Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	- Rasio linmas per jumlah RT 1,34 org/RT	-1,36 org/RT	- Proses regenerasi anggota Satlinmas belum berjalan sesuai dengan kebutuhan (pensiun dan meninggal dunia)	- Melaksanakan proses rekrutmen dan pengangkatan anggota Satlinmas baru termasuk Linmas wanita	Membuat edaran kepada Camat, Kepala desa/Lurah untuk:

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						- Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas	- Meningkatkan perhatian dan kesejahteraan anggota Satlinmas	- Melaksanakan rekrutmen anggota Satlinmas baru - Menyediakan anggaran yang cukup dalam penyelenggaraan Satlinmas di Desa/Kelurahan
				- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 83%	100%	Masih terbatasnya dan lamanya usia sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai standart	Memaksimalkan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai anggaran	-
				- Tingkat waktu tanggap 10 menit	15 menit	- Lamanya usia mobil pemadam kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian	- Memaksimalkan tugas pengecekan mobil setiap saat oleh petugas piket damkar	-

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						kebakaran - Belum terbentuknya pos sektor damkar di masing masing kecamatan	- Memaksimalkan tugas piket pos damkar - Menjalin dan meningkatkan koordinasi dan / informasi dengan perusahaan yang memiliki petugas dan sarana prasarana damkar	
				- Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 100%	100%	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan lanjutan sesuai jenis kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparatur damkar	Mengirim dan mengikuti lomba yang diselenggarakan lembaga/ pihak lain	-
			- Kegiatan Perlindungan Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	- Sarpras belum terpenuhi	- Secara bertahap dilakukan pemenuhan sarpras Satlinmas	- Penyediaan anggaran sarpras yang cukup

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua RW memiliki Satgas jogo tonggo - Belum semua Anggota Satlinmas mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi - Pembinaan yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong seluruh RW di Kabupaten Kudus untuk melaksanakan Jogo tonggo - Bekerjasama dengan pemerintah Provinsi, Kecamatan, dan desa untuk melaksanakan diklat bagi anggota Satlinmas - Melaksanakan kegiatan Jagong gayeng setiap minggu sekali tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat edaran kepada camat, kades tentang pelaksanaan jogo tonggo - Membuat edaran kepada camat dan kades untuk menyediakan pelatihan bagi anggota Satlinmas - Membuat jadwal

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
						terhadap Anggota Satlinmas belum dapat menjangkau seluruh anggota		pelaksanaan Jagong gayeng di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus
			- Kegiatan Pemadam Kebakaran	12 dokumen	12 dokumen	Terbatasnya jenis dan jumlah alat pelindung diri petugas damkar yang sesuai standart	Menggunakan alat pelindung diri yang ada	-
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	- Program pelayanan administrasi umum	82%	83,89%	Pelayanan masyarakat dalam penegakan Perda apabila yang disurvey para pelanggar Perda hasilnya banyak yang kurang puas karena mereka merasa dirugikan	Mengupayakan pelayanan sebaik-baiknya dengan pendekatan secara humanis.	-
			- Kegiatan Peningkatan sistem	6 dokumen	6 dokumen	Pelaksanaan sistem perencanaan,	Perencanaan Tahun 2021 menggunakan	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja			evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sebagian besar dilaksanakan secara online, karena dampak pandemi covid-19.	Sistem SIPD Kemendagri.	
			- Kegiatan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 dokumen	12 dokumen	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan dilaksanakan secara online, karena dampak pandemi covid-19	Menggunakan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan secara online	
			- Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	13 kegiatan	13 dokumen	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur dilaksanakan secara online, karena dampak pandemi covid-19	Pelayanan Kepegawaian secara online, pemeliharaan sarpras meningkat karena sarana mobilitas digunakan setiap hari dalam operasi/patroli penerapan protokol kesehatan penegakan	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
							Perbup 41 Tahun 2020	

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.5 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.949.993.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.214.527.870
- Permasalahan:
 - **Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum**
 - a. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum.
 - 1. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum**
 - a. Banyak orang cenderung membangun sebelum IMB keluar.
 - b. Adanya Kafe karaoke hall dan room masih operasional secara secara kucing-kucingan walau sudah dilarang di Kabupaten Kudus.
 - c. Masih adanya galian c yang operasional.
 - d. Banyaknya pengemis, anak jalanan (PGOT) yang masih beraktifitas ditempat umum / jalan.
 - e. Masih banyaknya PKL yang mengganggu ketertiban umum.

- f. Masih adanya peredaran dan konsumsi miras di sebagian wilayah Kab Kudus.
 - g. Masih banyaknya orang membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - h. Masih banyak terjadi pelanggaran operasional Hotel.
- 2. Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum**
- a. Masih terbatasnya tenaga PPNS.
 - b. Semakin banyaknya upaya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. menggunakan fasilitas daring / media sosial sehingga menyulitkan upaya penyelidikan.
 - d. Adanya masyarakat yang melanggar Perda/Perkada dengan dalih pandemi Covid-19.
- 3. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
- a. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meningkat dikarenakan tingkat kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah.
- 4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
- a. Dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus jumlah PKL semakin bertambah.
 - b. Dengan berkembang dan cepatnya informasi lewat handphone maka anak-anak jalanan, anak punk, pengemis dan ODGJ semakin membaaur lintas daerah untuk berkumpul sehingga mengakibatkan peningkatan Pelanggaran PGOT di Kabupaten Kudus.
- 5. Kegiatan Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
- a. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan belum tersedianya TPS di masing-masing Desa / Kecamatan sehingga Pelanggaran Pembuangan sampah dan limbah semakin meningkat.
 - b. Galian C, Parkir Liar, Kafe, Tindakan Mesum, IMB, Tawuran, Bolos sekolah, kebakaran, Pemerasan, Unjuk rasa, Pergurukan lahan juga.
- 6. Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran**
- a. Proses regenerasi anggota Satlinmas belum berjalan sesuai dengan kebutuhan (pensiun dan meninggal dunia).
 - b. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas.
 - c. Masih terbatasnya dan lamanya usia sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai standart.
 - d. Lamanya usia mobil pemadam kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian kebakaran.

- e. Belum terbentuknya pos sektor damkar di masing masing kecamatan.
- f. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan lanjutan sesuai jenis kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparatur damkar.

7. Kegiatan Perlindungan Masyarakat

- a. Sarpras belum terpenuhi.
- b. Belum semua RW memiliki Satgas joko tonggo.
- c. Belum semua Anggota Satlinmas mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi.
- d. Pembinaan yang dilakukan terhadap Anggota Satlinmas belum dapat menjangkau seluruh anggota.

8. Kegiatan Pemadam Kebakaran

- a. Terbatasnya jenis dan jumlah alat pelindung diri petugas damkar yang sesuai standart.
- b. Pelayanan masyarakat dalam penegakan Perda apabila yang disurvei para pelanggar Perda hasilnya banyak yang kurang puas karena mereka merasa dirugikan.
- c. Pelaksanaan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sebagian besar dilaksanakan secara online, karena dampak pandemi covid-19.
- d. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan dilaksanakan secara online, karena dampak pandemi covid-19.
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur dilaksanakan secara online, karena dampak pandemi covid-19.

Solusi:

1. Meningkatkan upaya sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum.
2. IMB tower dll keluar lama.
3. Tidak ada perbedaan yang mengatur kafe karaoke hall dan karaoke yang room padahal karaoke hall dibutuhkan untuk hiburan yang tidak mengandung unsur negative / asusilanya.
4. Penertiban galian c bukan kewenangan pol pp Kabupaten tetapi kewenangan pemerintah prov Jawa Tengah.
5. Kurangnya dukungan solusi dari dinas teknis terhadap hasil penertiban oleh Satpol PP.
6. Karena saat ini Perda yang mengatur PKL belum ada juklaknya sehingga Pol PP kesulitan untuk menertibkan karena belum adan zonasi yang mengaturnya.
7. Karena penerapan hukuman di pengadilan belum maksimal.
8. Tidak patuh pada aturan sehingga lebih memudahkan membuang sembarangan.

9. Adanya pihak Hotel yang masih menerima tamu lawan jenis yang tidak mempunyai ikatan pernikahan dalam 1 kamar.
10. Memaksimalkan tenaga PPNS dan mengusulkan penambahan tenaga PPNS.
11. Berupaya Menambah kemampuan anggota dalam pemantauan media social.
12. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat mematuhi Perda/Perkada tentang Trantibum.
13. Meminimalisir Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan jalan mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi.
14. OPD terkait yang membidangi PKL lebih aktif dalam penegasan dan pembinaan terhadap PKL sehingga Satpol PP bisa focus pada tugas penegakan perda
15. OPD terkait yang membidangi agar membuat sosialisasi berupa baliho terkait perda Nomor 15 tahun 2017 tentang Penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sehingga di lapangan bisa menindak bukan hanya PGOT tetapi juga yang memberi.
16. OPD yang menangani perijinan / retribusi agar rutin berkala memberikan data-data reklame yang berijin.
17. Kecamatan-kecamatan lebih berperan dalam penertiban reklame liar.
18. Agar tiap desa bisa menyediakan lahan TPS dengan difasilitasi OPD terkait.
19. Mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi terhadap gangguan tibum tranmas.
20. Melaksanakan proses rekrutmen dan pengangkatan anggota Satlinmas baru termasuk Linmas wanita.
21. Meningkatkan perhatian dan kesejahteraan anggota Satlinmas.
22. Memaksimalkan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai anggaran.
23. Memaksimalkan tugas pengecekan mobil setiap saat oleh petugas piket damkar.
24. Memaksimalkan tugas piket pos damkar.
25. Menjalin dan meningkatkan koordinasi dan / informasi dengan perusahaan yang memiliki petugas dan sarana prasarana damkar.
26. Mengirim dan mengikuti lomba yang diselenggarakan lembaga/ pihak lain.
27. Secara bertahap dilakukan pemenuhan sarpras Satlinmas.
28. Mendorong seluruh RW di Kabupaten Kudus untuk melaksanakan Jogo tonggo.
29. Bekerjasama dengan pemerintah Provinsi, Kecamatan, dan desa untuk melaksanakan diklat bagi anggota Satlinmas.
30. Melaksanakan kegiatan Jagong gayeng setiap minggu sekali tahun 2021.
31. Menggunakan alat pelindung diri yang ada.

32. Mengupayakan pelayanan sebaik-baiknya dengan pendekatan secara humanis.
33. Perencanaan Tahun 2021 menggunakan Sistem SIPD Kemendagri.
34. Menggunakan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan secara online.
35. Pelayanan Kepegawaian secara online, pemeliharaan sarpras meningkat karena sarana mobilitas digunakan setiap hari dalam operasi/patroli penerapan protokol kesehatan penegakan Perbup 41 Tahun 2020.

6. Urusan Sosial

Tabel 3.6

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
6.	Dinsos P3A P2KB Kab.Kudus	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rasio PMKS = 7.87%	64.680 org ----- x 100 865.969 7,47%	Masih banyaknya masyarakat yang ingin mendapat bantuan dari pemerintah meskipun sudah mampu	Sosialisasi dan Update data masyarakat kurang mampu melalui aplikasi dan perangkat desa	-
				Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah mendapat pelayanan sosial = 1.21%	5.022 -----x 100 51.933 9,7%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial = 5,60%	$\frac{456}{456} \times 100 = 100\%$			
				Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar = 40%	$\frac{51.933}{64.680} \times 100 = 80,3\%$			
			Keg. Peningkatan Pelayanan	Jumlah penyandang disabilitas	233 org			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			rehabilitasi Sosial	terlantar yang mendapat jaminan sosial = 50 org				
				Jumlah anak terlantar yang mendapat jaminan sosial= 25 org	87 org			
				Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat jaminan sosial = 50 org	89 org			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat jaminan sosial = 30 org	47 org	Susah mengentaskan karena sudah nyaman dg pekerjaannya, Tidak mau direhab, Tidak ada dukungan moril dari keluarga		
				Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang terselesaikan penanganannya = 5 org	20 org			
			Keg. Fasilitas Bantuan Perlindungan dan Jaminan	Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan	51.933 KK			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			Sosial	dasar sosial = 38.925 KK				
				Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah memperoleh pelayanan dasar sosial = 200 org	5.093 KK			
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar = 65%	10 lembaga ----- x 100 12 lembaga 83%			
				Persentase keluarga miskin yang	51.933 KK ----- x 100 62.763			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				memperoleh pelayanan dasar sosial = 68%	82,7%			
			Keg. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar= 8 lembaga	10 lembaga			
			Keg. Pelestarian, pendayagunaan, keperintisan nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara = 1 lok	1 lok			
			Keg. Pemberdayaan Keluarga	Jumlah keluarga miskin yang	51.933 KK			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			Miskin	memperoleh pelayanan dasar= 35.000 KK				
				Jumlah keluarga miskin yang memperoleh keterampilan=50 org	-			
				Pendataan, pengkajian, pengelolaan data PMKS dan PSKS=1 buku	1 buku			
				Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM)=	216.253 jw			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				228.000 org				
				Validasi Basis Data Terpadu dan Verifikasi peserta JKN KIS = 220.000 org	Valid BDT = 216.253 jw Verif JKN KIS= 55.448 org			
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indekx pemberdayaan Gender (IDG)=62.05	62.07			
				Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja = 65,20%	64,92%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				Rasio KDRT=0,018%	0,01%			
				STRATA kla=Pratama(1)	Madya (2)			
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu=100%	100%			
				Presentase pekerja perempuan	82, 62%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				=60,43%				
			Keg. Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan	Jumlah pekerja perempuan =174.000 org	175.571 org			
				Jumlah angkatan perempuan =211.000 org	212.494 org			
				Jumlah kasus KDRT=10 kasus	23 kasus			
				Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah =10.400 org	11.368 org			
				Jumlah anggota	26.790 org			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				organisasi perempuan dalam hal kesetaran gender dan perlindungan anak=27.370 org				
				Jumlah perempuan yang terlatih keterampilan usaha ekonomi produktif =576 org	288 org (18 klmpk @ 10 org)	Semula direncanakan 35 paket 560 org terealisasi 18 pkt 288 org karena pandemi covid-19 yang melarang kerumunan		
				Lomba anugerah parahita ekapraya (APE) 1 kali	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
					(Karena pandemi)			
				Data sistem informasi gender dan anak (SIGA) 1 buku	1 buku			
			Keg. Fasilitasi dan peningkatan kualitas perlindungan anak	Kabupaten layak anak (KLA)=prata m(1)	Madya(2)			
				Jumlah organisasi anak yang di bina 10 lembaga	9 lembaga			
				Fasilitasi anak korban kekerasan yang	21 kasus			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				diselesaikan di unit pelayanan terpadu = 10 kasus				
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prog. Keluarga berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk (LPP)-1,13%	1,15%			
				Total fertility rate (TFR)=2,03	1,89			
				Cakupan peserta KB aktif=69%	71,07%			
				Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)=13	14,35%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				%				
			Keg. Pengendalian penduduk dan advokasi pergerakan informasi	Jumlah wanita usia subur (usia 15-49 th)=244.255 org	230.112 org			
				Profil kependudukan= 1 buku	1 buku			
			Keg. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah pasangan usia subur = 112.000 PUS	101.485 PUS			
				Jumlah PUS yang istrinya dibawah 20	766 PUS			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				th				
				Jumlah PUS yang aktif ber-KB=89.000 PUS	101.485 PUS			
				Unmeet need KB=13%	10,5%			
				Pembinaan KB kepada para akseptor KB-17.000 akseptor	18.605 akseptor			
				Jumlah PUS yang mengikuti proram MKLP=80 PUS	1.611 PUS			
			Keg. Peningkatan	Jumlah BKB	30 kelpk			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga	terbina=30 kelpk				
				Jumlah BKR yang dibina=30 kelpk	30 kelpk			
				Jumlah BKL yang dibina=30 kelpk	30 kelpk			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		86,42	kegiatan sudah maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan	selalu menyesuaikan antara perencanaan dengan kegiatan	
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Dokumen perencanaan dan pelaporan	6 Dok	6			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 Bln	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1 Pkt	1			
			Program Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana		86,79			
			Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	- Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12 Bln	12			
			Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik	- Kedaruratan dan tersedianya logistik	1 Pkt	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
			Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	- Bahan bangunan untuk fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	1 Pkt	1			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.6 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Sosial, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.971.334.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.310.285.748.
- Permasalahan:
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang ingin mendapat bantuan dari pemerintah meskipun sudah mampu.
 - b. Susah mengentaskan karena sudah nyaman dg pekerjaannya, Tidak mau direhab, Tidak ada dukungan moril dari keluarga.
 - c. Semula direncanakan 35 pkt 560 org terrealisasi 18 pkt 288 org karena Pandemi Covid-19 yg melarang kerumunan.
 - d. Kegiatan sudah maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan
- Solusi:
 - a. selalu menyesuaikan antara perencanaan dengan kegiatan

Ringkasan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan bukan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Pertanahan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, dan Urusan Kearsipan. Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Urusan Tenaga Kerja

Tabel 3.7
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
1	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		91,88	Masa pandemi covid-19 menjadi penghambat waktu pelaksanaan karena sebagian besar kegiatan berorientasi pelayanan publik	Mengevaluasi hasil pelaksanaan triwulan sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan berikutnya.	
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan	- Penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan (Renja, LKJ IP, PK,	10 Dok	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
			pelaporan capaian kinerja	LPPD, LKPJ, Kudus dalam angka, SAKIP, RKPD, KUA PPA, Laporan Keuangan)					
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor	15 OB	15			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Meningkatnya Kapasitas sumber daya dan prasarana aparatur	21 Jenis	21			
				- Peningkatan Sarana dan Prasaranan Gedung Dekranasda	15 Jenis	1			
			Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan	persentase pencari kerja yang sudah bekerja		96,31			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
			produktivitas tenaga kerja						
			Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri	- Terselenggaranya Surveillance (audit kunjungan) ISO 9001 dan kegiatan job fair	2 Kgt	1			
			Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri (DBHCHT)	- Terselenggaranya penyuluhan, terbangunnya jejaring kerja dan job fair, terselenggaranya BKOL	8 Kgt	8			
			Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri	- Peningkatan kualitas lembaga ketrampilan kerja	25 Org	25			
			Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri (DBHCHT)	- Peningkatan produktifitas tenaga kerja	198 Org	198			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
			Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK	- Pelatihan ketrampilan berbasis masyarakat	1 Kgt	1			
			Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK (DBHCHT)	- Pelatihan Kerja Institusional BLK dan Pelatihan Kerja Keliling (Mobile Training Unit / MTU), Pemeliharaan Peralatan Pelatihan, Rehabilitasi Gedung	100 Unit	55			
			Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerja an	persentase kasus yang terselesaikan		95,11			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
			Fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial	- Terlaksananya usulan upah minimum tahun 2021	2 Kgt	2			
			Fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan	- Terlaksananya efektifitas kinerja LKS Tripartit	10 Kali	10			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.7 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Tenaga Kerja, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.215.976.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.511.571.906.
- Permasalahan:
 - a. Masa pandemi covid-19 menjadi penghambat waktu pelaksanaan karena sebagian besar kegiatan berorientasi pelayanan publik.
- Solusi:
 - a. Mengevaluasi hasil pelaksanaan triwulan sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan berikutnya.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.8

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	persentase pekerja perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu		87,81			Untuk point a dan d pada TA 2020 ini telah ditindaklanjuti dengan kegiatan <u>Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak</u>

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan	- Jumlah pekerja perempuan	174000 Org	200000			Untuk point b dan c pada TA 2020 ditindakl anjuti dengan kegiatan <u>Peningkatan Kualitas Pemberd ayaan Perempuan</u>
				- Jumlah angkatan kerja perempuan	211000 Org	287000			
				- Jumlah kasus KDRT	10 Kasus	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				- Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	10400 Org	11368			
				- Jumlah anggota organisasi perempuan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak	27000 Org	27000			
				- Jumlah perempuan yang terlatih keterampilan usaha ekonomi produktif	576 Org	96			
				- Lomba Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	1 Kali	1			
			Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan (DBHCHT)	- pelatihan keterampilan kepada kelompok usaha perempuan	30 Kelpk	11			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Fasilitasi dan peningkatan kualitas perlindungan anak	- Jumlah organisasi anak yang dibina	10 Lembaga	4			
				- Fasilitasi anak korban kekerasan yang diselesaikan di unit pelayanan terpadu	10 Kasus	1			
				- Tingkat Lomba Kabupaten Layak Anak (KLA)	1	1			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.8 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.039.923.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 913.187.730.
- Permasalahan: -

➤ Solusi: -

3. Urusan Pangan

Tabel 3.9
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
3	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama persentase keamanan pangan persentase penanganan daerah rawan pangan		96,96			
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan	- Prosentase sampel pangan yang diuji dalam kondisi aman untuk dikonsumsi	74%	87			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			pola konsumsi dan penganekara gaman pangan						
				- Prosentase Gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	100%	100			
			Pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan	- Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah)	30 Ton	-			
				- Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	18 Des/kel	17			
				- Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	19 Unit	19			
				- Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses	85%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				pangan di daerah					
			Peningkatan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan	- Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	120 Org	131			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.9 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pangan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Pertanian Dan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.821.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 285.197.225.
- Permasalahan:
- Solusi:

4. Urusan Pertanahan

Tabel 3.10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	persentase luas tanah bersertifikat		22			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	- Terlaksananya Penyerahan hasil pengadaan tanah	1 Pkt	1			
			Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bangub)	- Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk waduk logung	2 Pkt	0,44			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.10 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pertanahan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.918.725.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.845.655.869.
- Permasalahan:
- Solusi:

5. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 3.11
Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pengendalian dan konservasi LH	Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks tutupan lahan					
			Pengendalian Pencemaran	Jumlah dokumen pengendalian lingkungan hidup	1 Dok	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Lingkung an Hidup	- Nilai pengujian kualitas air	47,21	-			
			Pengenda lian Pencemar an Lingkung an Hidup (DBHCHT)	- Jumlah pengujian kualitas air sekitar IHT	36 Lok	36			
				- Jumlah pengujian kualitas udara sekitar IHT	27 Titik	27			
				- Jumlah laboratorium lingkungan hidup yang berfungsi	1 Unit	1			
			Pemuliha n Kerusaka n Lingkung an Hidup	- Jumlah desa/lembaga yang difasilitasi melaksanakan usaha pencegahan dan atau pemulihan kerusakan	2 Des/Kel	2			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				lingkungan hidup					
				- Jumlah dokumen inventarisasi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	1 Dok	1			
			Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		86,01			
			Pembinaan dan pengawasan	- Persentase ijin lingkungan yang diawasi	27%	27,04			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			lingkung an hidup	- Persentase tindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan	100%	100			
			Pengemb angan kapasitas lingkung an hidup	- Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	6 Skl	6			
				- Jumlah bank sampah yang dibina	2 Unit	2			
				- Jumlah peningkatan komunitas pecinta lingkungan	1 Kelpk	-			
				- Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup	3 Jenis	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	persentase penanganan volume sampah proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)		95,91			
			Pengelolaan sampah dan limbah B3	- Jumlah penanganan sampah	120.693 Ton	126,667			
				- Jumlah fasilitasi pengelolaan limbah B3	6 Unit Usaha	20			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pengelolaan RTH	- Pemeliharaan RTH/taman kota milik pemda	46 Lok	46			
			Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Persampahan	- Jumlah sampah yang dikelola di TPA	46720 Ton	46233			
				- Jumlah pengelolaan limbah tinja	155 M3	155			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.11 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.332.095.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.940.744.567.
- Permasalahan:
- Solusi:

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil

**Tabel 3.12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		92,59	Tahun 2020 terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk e-purchasing dari LKPP, sehingga dilakukan perubahan pemaketan barang/jasa menjadi tender; terjadi pandemi Covid-19.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang jasa pada semester pertama tahun berikutnya, terutama untuk e-purchasing	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai dengan standar	23 Dok	23		2. Melakukan penyesuaian Perubahan Renja Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 berikut pemutakhirannya	
				- Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA-PPAS perubahan, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)	8 Dok	8			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				- Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen Kependudukan per triwulan)	12 Dok	12			
				- Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)	3 Dok	3			
			Pelayan an administ rasi dan pelapora n	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai standar	29 Dok	29			
			keuanga n	- Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				- jumlah Dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar	12 Dok	12			
				- Jumlah dokumen evaluasi serapan anggaran (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar	12 Dok	12			
				- Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Prognosis; Laporan Keuangan OPD) yang tersusun sesuai standar	2 Dok	2			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	6 Org	6			
			Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		88,35			
			Fasilitas dan peningkatan pelayanan identitas	- Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	80000 Lbr	81217			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			penduduk						
			Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (DAK Non Fisik)	- Jumlah pengadaan bahan pakai habis KTP, cetak formulir, blangko KIA dan pencetakan dokumen pendaftaran penduduk	1 Pkt	1			
			Fasilitas dan peningkatan pelayanan pindah datang	- Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9000 Dok	9000			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			dan pendata an pendud uk						
			Progra m Pelayan an Pencata tan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0- 18 tahun		85,28			
			Fasilitas i dan peningk atan pelayan an akta kelahira n dan kematia n	- Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar	30000 Lbr	30000			
			Sosialisa si, pelayan an dan	- Jumlah pengadaan bahan pakai habis, cetak formulir dan	1 Pkt	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			penerbitan dokumen pencatatan sipil (DAK Non Fisik)	pencetakan dokumen pencatatan sipil					
			Fasilitas dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarga negaraa	- Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur	85000 Org	132715			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			n						
			Progra m Pengelo laan Informa si Adminis trasi Kepend udukan dan Pemanf aatan Data	cakupan pengelolaan database kependudukan		83,61			
			Pemban gunan dan pengope rasian SIAK secara terpadu	- Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasional sesuai standar	30 Unit	30			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan/ SIAK (DAK Non Fisik)	- Jumlah fasilitasi pelayanan Dukcapil Go-Digital dan inovasi pelayanan	6 Bln	6			
			Fasilitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan	- Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	2 Instansi	1			
				- Terselenggaranya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dalam daerah; dan konsultasi penyusunan	1 Kali/th	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/K EG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			an	Perjanjian Kerja Sama/PKS pemanfaatan data kependudukan di tingkat provinsi					

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.12 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Capil, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.796.422.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 9.862.403.256.
- Permasalahan:
 - a. Tahun 2020 terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk e-purchasing dari LKPP, sehingga dilakukan perubahan pemaketan barang/jasa menjadi tender; terjadi pandemi Covid-19.
- Solusi:
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang jasa pada semester pertama tahun berikutnya, terutama untuk e-purchasing.
 - b. Melakukan penyesuaian Perubahan Renja Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 berikut pemutakhirannya.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		95,07			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar	6 Dok	6			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	6 Dok	6			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan	- Jumlah bulan pelayanan Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bln	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			sarana prasara na aparatur						
			Progra m peningk atan pember dayaan masyara kat	persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa persentase peningkatan kawasan perdesaan		95,4			
			Peningk atan pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan	- Jumlah lembaga yang diberdayakan	738 Lembaga	738			
			Pelaksa naan TMMD (Bangub)	- Terlaksananya kegiatan TMMD / Karya Bhakti	3 Des/ kel	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Fasilitas i Pengem bangan perekon omian Masyara kat dan infrastru ktur Desa	- Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa	123 Des/ kel	123			
			Progra m fasilitas i pemerin tahan desa	persentase desa yang bermasalah		86,54			
			Fasilitas i Pemerin tahan Desa dan Badan Permusy	- Jumlah desa yang difasilitasi Pemerintahan Desa dan BPD	123 Des/ kel	123			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			awaratan Desa						
			Fasilitas pengelolaan keuangan dan aset desa	- Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	123 Des/ kel	123			
			Pengelolaan Sistem Informasi Desa	- Jumlah aplikasi SID	1 Pkt	1			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.13 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.302.569.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 9.669.513.905.
- Permasalahan:

➤ Solusi:

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 3.14

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Keluarga Berencana	cakupan peserta KB aktif persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang		86,82			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Informasi	- Jumlah wanita usia subur (usia 15 - 49 th)	230000 Org	165665			
				- Grand desain kependudukan	1 Buku	-			
			Peningkatan pelayanan Keluarga	- Jumlah Pasangan Usia Subur	112000 PUS	139951			
			Berencana dan Kesehatan	- Jumlah Pasangan Usia Subur yang aktif ber-KB	89000 PUS	99196			
			Reproduksi	- pembinaan KB dan KR	750 Akseptor	670			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				- Jumlah PUS yang mengikuti program MKJP	13075 PUS	13268			
				- Jumlah PUS yg istrinya dibawah 20 thn	750 PUS	766			
				- Unmeet Need	13%	10,54			
			Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK Fisik)	- Pengadaan sarpras Keluarga Berencana :	5 Unit	5			
				- Pembangunan Balai penyuluh KB	3 Unit	1			
				- pengadaan Sepeda motor KB	1 Unit Motor	2			
				- Pengadaan Mobil KB	1 Unit Mobil	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK Non Fisik)	- Operasional Balai Penyuluh KB; Penyuluh Tk Kec; Pertemuan Kelompok Kerja; Forum Musdes; Lokakarya Mini; Pembinaan 5 Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS)	10 Kgt	10			
				- Sinkronisasi data; Pencatatan Pelaporan; Pembinaan Program oleh Kader (PPKBD); dan Pembinaan Program oleh Kader (Sub PPKBD)	4 Kgt	4			
				- Pemeliharaan Baliho Sosialisasi KB	18 Unit	18			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Peningkat an Keluarga Sejahtera dan Pemberda yaan Keluarga	- jumlah BKB terbina	30 Kelpk	30			
				- Jumlah BKR terbina	30 Kelpk	30			
				- Jumlah BKL terbina	30 Kelpk	30			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.14 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.509.382.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.160.851.439.
- Permasalahan:
- Solusi

9. Urusan Perhubungan

Tabel 3.15
Dinas Perhubungan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
9.	Dinas Perhubungan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		88,78			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		pemerintah an							
			Peningka tan sistem perencan aan, evaluasi dan pelapora n capaian kinerja	- Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan yang disusun standar	24 Dok	24			
			Pelayana n administr asi dan pelapora	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai	29 Dok	29			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			n keuanga n	standar					
			Peningka tan kapasitas sumber daya dan sarana	- Jumlah dokumen pengelolaan sumber daya dan sarpras aparatur yang tersusun sesuai ketentuan	33 Dok	33			
			prasaran a aparatur	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Org	2			
				- Jumlah pegawai honoror daerah dan tenaga kontrak	115 org	115			
			Program Peningk atan Manajem en Pengelol aan Lalu Lintas dan	kecepatan rata- rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan		85,37			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Angkuta n Jalan						
			Peningka tan Manajem en	- Jumlah dokumen perencanaan dan review lalu lintas	6 Dok	6			
			Pengelola an Lalu Lintas	- Jumlah CCTV dan jaringannya yang dipelihara	26 Titik	26			
				- Jumlah penghargaan WTN yang diraih	1	1			
			Peningka tan Manajem en	- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum	2 Dok	2			
			Pengelola an Angkuta n Jalan	- Jumlah pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan barang yang mendapatkan penyuluhan	50 Org	50			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Operasio nal Pengelolan UPTD Perparkiran dan Terminal	- jumlah Dokumen administrasi dan pelaporan perparkiran dan terminal	12 Dok	12			
				- Jumlah prasarana perparkiran dan terminal yang direhab/ditingkatkan	5 Unit	5			
			Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan		97,93			
			Peningkatan Keselamatan LLAJ	- Jumlah dokumen perencanaan keselamatan LLAJ	1 Dok	1			
				- Jumlah pengadaan Perlengkapan Jalan	180 Fok	180			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				- Jumlah pengadaan Marka Lalu Lintas	685 M2	685			
				- Jumlah pengadaan pagar pengaman jalan	40 M	40			
				- Jumlah pelajar yang mengikuti penyuluhan keselamatan lalu lintas dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	100 Org	100			
				- Jumlah Pengadaan Zone Selamat Sekolah (ZoSS)	3 Lok	3			
				- Jumlah Aplikasi Keselamatan LLAj yang dibangun/dikembangkan/dipelihara	1 aplikasi	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkatan Sarana Prasarana LLAJ	- Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan	18350 Org	18350			
				- Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara dan dikalibrasi	11 Unit	11			
				- Jumlah perlengkapan lalu lintas yang dipelihara	80 Unit	80			
				- Jumlah operator kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan penyuluhan	150 Org	100			
				- Jumlah sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola	1 Sys	1			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.15 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Perhubungan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada

Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.728.238.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 16.700.450.764.

- Permasalahan:
- Solusi:

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.16
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
10.	Dinas Komunika si dan Informatik a	Pemantapan Pembanguna n Struktur Perekonomia n Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola	Program pelayanan administras i umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		93,91			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		pemerintah n							
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA PPAS Perubahan tingkat OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)	8 Dok	8			
				- Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulan)	4 Dok	4			
				- Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)	3 Dok	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	3			
				- Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar	12 Dok	12			
				- Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan; Laporan Prognosis ; Laporan Keuangan OPD) yang tersusun sesuai standar	14 Dok	13			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana	- Jumlah Laporan BMD / sarpras aparatur yang tersusun sesuai standar	16 Dok	16			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar	18 Dok	18			
				- Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian OPD (Survey Kepuasan Masyarakat, Rencana Tindaklanjut Pengendalian, Zona Integritas) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				- Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara	12 Unit	12			
				- Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor	3 Unit	3			
				- Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	1 Org	-			
				- Jumlah barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran	1 Pkt	1			
				- Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Org	-			
				- Jumlah tenaga kontrak	7 Org	7			
			Program pengelolaan komunikasi	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai		98,99			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			dan informasi publik	media					
			Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentas i	- Jumlah PPID Pembantu yang mengikuti Bintek PPID	177 Org	100			
				- Jumlah Penerbitan Media Cetak	500 Eksp	250			
				- Jumlah Pemohonan informasi yang dilayani	12 Org	37			
				- jumlah Liputan kegiatan Kepala daerah	200 berita	258			
				Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan	- Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak)	20 Org	21		
				- Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan kepala OPD dengan insan media	38 Kali	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			informasi publik	Jumlah Lembaga Penyiaran yang dioperasikan	1 Lembaga	1			
				Jumlah Kompetisi yang diselenggarakan	1 kompetisi	1			
				Jumlah Penayangan Publikasi Media cetak, media elektronik, publikasi media sosial, publikasi media online, media luar ruang, media tradisional, media interpersonal dan publikasi pemberian ucapan selamat kepada stakeholder	993 Kali	984			
				Jumlah pemeliharaan website dan aplikasi	4 Web	-			
				Jumlah Sarana dan prasarana pendukung peralatan studio, sarana dan	32 Unit	5			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				prasarana pendukung dokumentasi dan publikasi					
			Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	kebijakan internal SPB Etata kelola SPBE layanan SPBE		28,92			
			Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah tenaga teknis jaringan komunikasi data	5 Org	5			
				Jenis Jaringan Komunikasi data yang dipelihara	1 jaringan	1			
				Jumlah OPD yang terhubung jaringan FO	10 OPD	-			
				Jumlah menara telekomunikasi dimonitoring	120 Obyek	149			
			Pengelolaan dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan	1 Dok	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			an sumber daya komunikasi dan sistem informasi	Smart City					
				Jumlah regulasi aplikasi	2 Perbup	1			
				Jumlah aplikasi yang terintegrasi	10 aplikasi	10			
				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	200 Org	-			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.16 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.410.208.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 18.629.520.648.
- Permasalahan:
- Solusi:

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 3.17
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
11.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustr ian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas : - Pertumbuhan ekonomi kreatif, - Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program peningka tan dan pengemb angan koperasi, usaha kecil dan menenga h	Prosentase koperasi aktif persentase perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		87,5			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkatan dan pengembangan koperasi	- Terselenggaranya Sosialisasi, Bintek dan Pameran Hari Koperasi	3 Kgt	3			
			Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	- Kemitraan UMKM	1 Kgt	1			
			Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha	- Keikutsertaan promosi produk unggulan umkm dalam provinsi, luar provinsi dalam pulau dan luar provinsi luar pulau	5 Kgt	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Kecil dan Menenga h (DBHCHT)						
			Peningka tan dan Pengemb angan Sumber Daya	- Penyusunan naskah akademik Perda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1 Dok	1			
			Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menenga h	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (Pendampingan dan Pelatihan) / Sumber Dana DAK	2 Kgt	2			
			Peningka tan dan Pengemb angan Sumber Daya	- Pelatihan kewirausahaan UMKM (6 kegiatan) dan tenaga pendamping	7 Kgt	4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menenga h (DBHCHT)	UMKM /5 orang (1 kegiatan)					
			Peningka tan dan pengemb angan SDM dan Teknologi UKM (DAK)	- Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (Pendampingan dan Pelatihan)	2 Kgt	7			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.17 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.596.673.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.397.028.623.
- Permasalahan:
- Solusi:

12. Urusan Penanaman Modal

Tabel 3.18
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
12.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		81,35	Dengan adanya covid 19 koordinasi dengan perusahaan mengalami kendala untuk melakukan monitoring , evaluasi, pengawasan dan pembinaan	1.Meningkatkan hubungan kerja dengan perusahaan	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 Dok	29			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	29 Dok	29			
			Peningkatan kapasitas sumber	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	16			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	49 Dok	49			
				- Jumlah ASN dan Non ASN yang kompeten	33 Org	33			
				- Jumlah sarpras yang dikelola	13 Unit	13			
			Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	persentase peningkatan jumlah investor		89,05			
			Perencanaan penanaman modal	- Jumlah sistem informasi investasi yang dikelola	1 Sys	1			
				- Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	7 Dok	7			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				yang mendukung program					
			Pengembangan iklim penanaman modal	- Jumlah kemitraan kerjasama usaha	1 Kemitraan	1			
				- Jumlah kepedulian investasi	3 Kepedulian	3			
				- Jumlah Dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang mendukung program	3 Dok	3			
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	realisasi investasi yang dilaporkan		52,99			
			Pembinaan dan pemantauan	- Jumlah perusahaan yang terfasilitasi penyampaian LKPM	50 Perusahaan	50			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			penanam an modal	- Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi pendukung program	5 Dok	5			
			Pengawas an penanam an modal	- Jumlah perusahaan yang terevaluasi	75 Perusaha an	28			
				- Jumlah dokumen pengawasan penanaman modal pendukung program	8 Dok	8			
			Program Pelayana n Perizina n Pembang unan dan Lingkun gan	persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan		94,82			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Fasilitasi Pelayana n Perizinan Pembang unan	- Jumlah perizinan pembangunan terbit sesuai standar pelayanan	148 SK	872			
				- Jumlah laporan/dokumen fasilitasi pelayanan perizinan pembangunan pendukung program	26 Dok	26			
			Fasilitasi Pelayana n Perizinan Lingkung an	- Jumlah perizinan lingkungan terbit sesuai standar pelayanan	48 SK	384			
				- Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan pendukung program	26 Dok	26			
			Program Pelayana n Perizina	persentase pelayanan perizinan perekonomian dan		94,38			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			n Perekon omian dan Jasa Usaha	jasa usaha yang sesuai standar pelayanan					
			Fasilitasi Pelayana n Perizinan	- Jumlah Perizinan Perekonomian terbit sesuai Standar Pelayanan	825 SK	927			
			Perekono mian	- Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi Pelayanan Perizinan Perekonomian pendukung program	26 Dok	26			
			Fasilitasi Pelayana n Perizinan	- Jumlah perizinan jasa usaha terbit sesuai standar pelayanan	456 SK	720			
			Jasa Usaha	- Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi pelayanan perizinan jasa usaha pendukung	26 Dok	26			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				program					

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.18 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.795.121.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 5.401.402.008.
- Permasalahan:
 - a. Dengan adanya covid 19 koordinasi dengan perusahaan mengalami kendala untuk melakukan monitoring , evaluasi, pengawasan dan pembinaan.
- Solusi:
 - a. Meningkatkan hubungan kerja dengan perusahaan.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 3.19
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
13.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase kegiatan kepemudaan		81,17			Tindak lanjut terkait point a adalah dengan kegiatan Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan	jumlah pemuda yang mengikuti pemuda pelopor keamanan lingkungan, jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan ketrampilan, jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan imtaq, jumlah pemuda yang terseleksi lomba, jumlah pemuda yang memiliki kompetensi paskibraka, jumlah pemuda yang terfasilitasi pengembangan sumber daya pemuda	385 Org	385			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina, jumlah organisasi yang mengikuti kegiatan hari sumpah pemuda	29 Orgn	29			
				dokumen pendataan organisasi pemuda	1 Dok	1			
			Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	cakupan pembinaan olahraga		91,47			
			Pengembangan dan pemberdayaan olahraga	jumlah peserta popda kabupaten, oosn kabupaten, Kejurda, pekan seni, pembinaan olahraga	14516 Org	14516			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				jumlah tim gerak jalan hut ri, tim gerak jalan 28 km	419 klpk	419			
			Peningkatan prestasi dan pengelolaan sarana prasarana olahraga	jumlah dokumen pendataan olahraga	1 Dok	1			
				jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1 Kgt	1			
				jumlah peserta festival olahraga tradisional	230 Org	230			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.19 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.871.056.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.709.856.277.
- Permasalahan:
- Solusi:

14. Urusan Statistik

Tabel 3.20
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pengembangan data / informasi/statistik daerah	Cakupan pelayanan data statistik sektoral		49,19			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		n							
			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral	- Jumlah Publikasi Data statistik	4 Dok	1			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.20 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Statistik, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.973.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.741.764.
- Permasalahan:
- Solusi:

15. Urusan Persandian

Tabel 3.21
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS I MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
15.	Dinas Komunika si dan Informatik a	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pengelolaan persandian	persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian		25,83			
			Pengelolaan persandian	Jumlah aparatur yang mengetahui keamanan informasi	1 Org	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS I MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				Jumlah Assesment keamanan informasi	1 aplikasi	-			
				Jumlah aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik	4 aplikasi	4			
				Jumlah ruang server yang terpelihara sesuai standar keamanan informasi	1 Ruang	1			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.21 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Persandian, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.970.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.391.000.
- Permasalahan:
- Solusi:

16. Urusan Kebudayaan

Tabel 3.22
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
16.	Dinas Kebudayaa n Dan Pariwisata	Pemantapan Pembanguna n Struktur Perekonomia n Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pertumbuha n ekonomi kreatif	Program pelayanan administr asi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		94,52			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkat an sistem perencana an, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10 Dok	10			
			Pelayanan administra si dan pelaporan keuangan	- Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor	10 Dok	10			
			Peningkat an kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Meningkatnya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	16 Dok	16			
			Program pengemba ngan dan pengelola	persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan		58,61			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			an kekayaan budaya dan cagar budaya	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu					
			Pembinaa n dan pengemba ngan kesenian dan kebudayaa n daerah	- Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1 Thn	1			
			Pengelolaa n dan pengemba ngan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	- Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	3 Pkt	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
			Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	- Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	12 Bln	12			
			Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	- Persentase jumlah seni/budaya yang diaktualisasikan	53%	40			
			Museum dan Taman Budaya (DAK)	- Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	17%	13			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.22 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Kebudayaan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.646.075.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 10.071.910.176.
- Permasalahan:
- Solusi:

17. Urusan Perpustakaan

Tabel 3.23
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
17.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	persentase pengunjung perpustakaan per tahun persentase ketersediaan bahan pustaka		81,98			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkatan administrasi perpustakaan dan pengembangan jaringan informasi perpustakaan	- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	63371 Org	20346			
			Pengelolaan perpustakaan daerah	- Jumlah bahan pustaka	43533 Buku	43515			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.23 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.414.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 15.096.000.
- Permasalahan:
- Solusi

18. Urusan Kearsipan

**Tabel 3.24
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
18.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		93,98			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		tata kelola pemerintah n							
			Peningkata n sistem perencanaa n, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar	29 Dok	29			
			Pelayanan administras i dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai	29 Dok	29			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
				standar					
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	8 Org	8			
			Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku		91,03			
			Peningkatan administrasi kearsipan dan	- Jumlah OPD yang melaksanakan JRA	2 OPD	2			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			pengembangan jaringan informasi kearsipan						

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.24 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Kearsipan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan bukan pelayanan dasar, pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.45.599.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.172.654.223.
- Permasalahan:
- Solusi:

Ringkasan Urusan Pilihan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain melaksanakan Urusan Wajib, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai ketentuan. Pada Tahun Anggaran 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi : Urusan Pertanian, Urusan Pariwisata, Urusan Kehutanan, Urusan Perdagangan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Perindustrian serta Urusan Transmigrasi. Pelaksanaan urusan Pilihan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Tabel 3.25
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
1	Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatka n produktifitas hasil perikanan	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan Peningkata n dan pengemban gan produksi perikanan	- Persentase peningkatan produksi perikanan 97,1 % - Jumlah produksi perikanan budidaya 2165 ton - Jumlah produksi perikanan tangkap 515 ton	- 97,13 % - 2165,16 - 515,24			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			2. Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Jumlah produksi olahan hasil perikanan 1825 ton	- 1826,75			
			3. Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Perikanan	- 125.000.000 ekor	- 112.220.000 ekor			

- Penyelenggaraan urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.25 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan, pada Dinas Pertanian dan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.110.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 125.970.250.
- Permasalahan:
- Solusi:

2. Urusan Pariwisata

Tabel 3.26
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
2	Dinas Kebudaya aan Dan Pariwisata	Pemantapan Pembanguna n Struktur Perekonomia n Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pertumbuha n ekonomi kreatif	Program peningka tan dan pengemb angan pariwisat a	Persentase kunjungan wisata Persentase PAD sektor pariwisata		90,4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	- Terlaksananya peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	1 Kgt	1			
			Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	- Terlaksananya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	4 Kgt	4			
			Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	- Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	12 bln	12			
			Peningkatan dan Pengembangan	- Persentase peningkatan sarpras pariwisata	4%	4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			ngan Promosi Pariwisat a (DAK)	yang memadai					
				- Persentase peningkatan promosi pariwisata	12%	12			

- Penyelenggaraan urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.26 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pariwisata, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.740.259.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.477.162.640.
- Permasalahan:
- Solusi:

3. Urusan Pertanian

Tabel 3.27
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
3	Dinas Pertani an dan Pangan	Meningkatk an Produktifita s hasil Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perk ebunan 1. Peningkata n produksi tanaman pangan	- Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/per kebunan 95,19 % - Jumlah petani yang meningkat ketrampilanny a 200 org - Jumlah penyediaan obat-obatan	- 96,5 % - 200 org - 1925 kg	Tidak tercapainya target indicator kinerja tahun 2020 khususnya indicator tertanamnya tanaman perkebunnya dan buah-buahan unggulan daerah	Adanya refocusing anggaran karena adanya pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak terlaksana untuk itu tahun depan dianggarkan kembali	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			2. Peningkatan produksi tanaman perkebunan	<p>pertanian 1000 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya 150 org - Panjang jalan usaha tani dan irigasi kondisi baik 448 km 	<ul style="list-style-type: none"> - 150 org - 452 km - 5 unit 			
			3. Peningkatan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah benih padi bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,8 ton 			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			produksi pertanian/p erkebunan	yang tersedia 3 ton				
			4. Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Pertanian	- Persentase peningkatan produksi peternakan 86,38%	- 79,21%			
			Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	- Jumlah populasi ternak besar 11.168	- 11.214			
				- Jumlah populasi ternak kecil 40.175	- 41.275			
				- Jumlah populasi ternak unggas 11.023.878 Ekor	- 12.161.697 ekor			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			1. Pembinaan dan pengembangan peternakan	- Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi 125 org	- 125 org			
			2. Peningkatan usaha dan sarana prasarana peternakan	- Jumlah hewan yang disembelih sesuai standart	- 1159 ekor			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			3. Operasional Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan	ASUH 1250 ekor - Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan 125 ekor	- 127 ekor			

➤ Penyelenggaraan urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.27 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pertanian, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan, pada Dinas Pertanian dan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.113.342.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 16.148.957.446.

➤ Permasalahan:

➤ Solusi:

4. Urusan Kehutanan

Tabel 3.28
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pertumbuhan ekonomi kreatif	Program pengelola an taman hutan raya	Persentase tutupan lahan		99,16			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Program pengelolan taman hutan raya	- Taman hutan raya, kebun raya	1 Lok	1			

- Penyelenggaraan urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.28 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Kehutanan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan, pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.355.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 5.310.000.
- Permasalahan:
- Solusi:

5. Urusan Perdagangan

Tabel 3.29
Dinas Perdagangan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
5.	Dinas Perdagangan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pengembangan	Program pelayanan administ rasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		83,11	Pandemi Virus Covid 19	1. Optimalisasi	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
		Jaringan Perdagangan dan Jasa							
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar	5 Dok	5		2. Lebih mengoptimalkan lagi	
			Pelayanan administrasi dan pelaporan	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang	13 Dok	19			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			keuangan	tersusun sesuai standar					
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- jumlah pelayanan sarpras aparatur	3 Jenis	3			
				- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	16			
				- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	12 Dok	12			
				- Jumlah ASN dan Non ASN yang kompeten	304 Org	292			
				- Jumlah sarpras yang dikelola : Barang Tidak bergerak (Gedung) yang	36 Unit	36			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				dikelola					
				- Jumlah Barang Bergerak (Kendaraan dinas mobil dan sepeda motor) yang dikelola	25 Unit	25			
				- Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	2			
			Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		89,62			
			Pembinaan dan Penataan PKL	- Jumlah penataan di lokasi PKL	6 Kali	11			
				- Jumlah PKL yang dibina	160 Org	305			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pemberda yaan PKL	- Jumlah PKL pada acara tradisi Dandangan	0 Org	10			
			Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindu ngan Konsume n	cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi cakupan fasilitasi perlindungan konsumen		12,58			
			Fasilitasi, Pembinaa n dan	- Jumlah pengawasan barang yang	12 Kali	40			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pengawas an Perdagangan	dilakukan					
				- Jumlah pemantauan harga bahan pokok	356 Kali	362			
				- Jumlah pelaku usaha potensi ekspor	6 Org	1			
			Promosi dan Perlindungan Konsumen	- Jumlah UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	10000 Unit	6853			
				- Jumlah peserta Sosialisasi Undang-undang UTTP	60 Org	70			
				- Jumlah masalah sengketa konsumen yang telah difasilitasi	2 Kejadian	-			
				- Jumlah UKM yang mengikuti pameran	4 UMKM	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi, Pembinaa n dan Pengawas an Perdagan gan (DAK)		4 Unit	-			
			Program Peningka tan dan Pengelola an Pasar	Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD Cakupan Pengelolaan Pasar rakyat		88,7			
			Pengelola an Pendapat an, Ketertiba n dan Kebersiha n Pasar	- Realisasi penerimaan retribusi pasar	-30%	10,04			
			Penataan pembang unan dan	- Jumlah pasar yang direvitalisasi dan	8 Pkt	7			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkat an Pengelola an Sarana Prasarana Pasar	dibangun					

- Penyelenggaraan urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.29 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Perdagangan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan, pada Dinas Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.507.035.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 23.057.208.801.
- Permasalahan:
- Solusi:

6. Urusan Perindustrian

Tabel 3.30
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
6.	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menenga h	Pemantapan Pembangun an Struktur Perekonomi an Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas : - Pertumbuha	Program peningka tan dan pengemb angan perindust rian	Prosentase peningkatan IKM		96,4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		n ekonomi kreatif - Penguranga n kemiskinan dan penganggur an							

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkat an dan pengemba ngan industri kimia, agro dan hasil hutan (DBHCHT)	- Pelaksanaan pameran, Operasional Laboratorium dan fasilitasi dekranasda	15 Kgt	13			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Peningkat an dan pengemba ngan Industri Logam, Mesin, Elektroni ka dan Aneka Industri (DBHCHT)	- Magang dan Workshop Fashion	7 Jenis	4			

- Penyelenggaraan urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.30 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Perindustrian, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan Urusan Pilahan, pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 783.825.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 755.607.549.
- Permasalahan:
- Solusi:

7. Urusan Transmigrasi

Tabel 3.31

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
7.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pengurangan kemiskinan dan penganggura	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Prosentase calon transmigran yang terfasilitasi		30,63			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIA N PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		n							
			Fasilita si perpind ahan dan penem patan transmi grasi	- Survey lokasi dan fasilitasi pemberangkatan transmigran	1 Kali	1			

- Penyelenggaraan urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.31 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Transmigrasi, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan, pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.594.000.
- Permasalahan:
- Solusi:

Ringkasan Fungsi Penunjang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Badan Daerah selaku pelaksana fungsi penunjang (*technostructure*) melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*Operating Core*).

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut. Pelaksanaan Fungsi Penunjang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Tabel 3.32
Urusan Administrasi Pemerintahan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
1	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		87,77			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	1 Dok	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	16			
			Program fasilitasi tata pemerintahan	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan persentase fasilitasi kerjasama		88,61			
			Fasilitasi Pemerintahan Daerah	- Jumlah kunjungan kerja yang terlayani	25 Kali	22			
			Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama	- Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan terbit dimedia massa sesuai ketentuan	2 Dok	2			
	Sekretariat Daerah Bagian Hukum		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80,88			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	1 Dok	5			
			Program pelayanan administrasi umum	- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar	6 Dok	5			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Sarpras dan Peningkatan kapasitas aparatur	76 Dok	5			
				- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	8			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan	- Jumlah dokumen pengelolaan asset yang tersusun sesuai ketentuan	60 Dok	10			
				- Jumlah ASN yang kompeten	13 Dok	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			hukum dan penegakan HAM Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan	Prosentase penataan terhadap peraturan perundang- undangan dan penyelesaian penanganan kasus Pemda persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan		86,92			
				- Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan yang tersusun	70 Draft	142			
			Pengkajian dan publikasi peraturan perundang- undangan	- Jumlah Himpunan Peraturan Daerah dan Himpunan Peraturan Bupati yang dicetak dan dipublikasikan	380 Buku	380			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM	- Prosentase tertanganinya Perkara Pemda	100%	50			
			Pengkajian dan publikasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah dokumen Ranham yang dilaporkan	2 Dok	-			
			Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM (DBHCHT) Program pelayanan administrasi umum	- Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi Peraturan PerUUan bidang cukai	200 Org	-			
	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		53,95			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang disusun sesuai standar	1 Dok	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	60 Dok	45			
			Program peningkatan kesejahteraan rakyat	persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh		83,63			
			Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial	- Jumlah guru non PNS Madin, TPQ, Diakonia dan FPPMS	7352 Org	5514			
			Fasilitasi kegiatan keagamaan	- Jumlah Fasilitasi kegiatan Keagamaan	25 Kgt	9			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		98,15			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100			
			Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat nilai akuntabilitas kinerja Indeks Reformasi Birokrasi cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan		90,81			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi					
			Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	- Terfasiltasinya Kelembagaan Perangkat Daerah	9 OPD	34			
			Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	- Terfasilitasinya Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	100%	100			
			Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	- Terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	41 OPD	34			
	Sekretariat Daerah Bagian Umum		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat		76,95			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				daerah					
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	189 Dok	110			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah Penyediaan Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	27 Unit	57			
			Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian	- Jumlah dokumen pedoman pengelolaan sumber daya aparatur perangkat daerah	17 Dok	11			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai	17 Dok	4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				standar					
	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Program pelayanan administrasi umum Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		73,59			
				- Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	1 Dok	1			
			Program pelayanan administrasi umum	- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar	6 Dok	6			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai kebutuhan	16 Dok	16			
				- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun	60 Dok	60			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				sesuai ketentuan					
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	- Jumlah ASN yang kompeten	15 Org	16			
				- Jumlah peserta sosialisasi yang memahami aturan/ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa	175 Org	375			
				- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	4 Dok	4			
			Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	- Jumlah fasilitasi pengadaan barang/jasa	278 pkt	86			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tersusun sesuai standar	4 Dok	4			
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	- Jumlah unit kerja yang terfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik	71 OPD	71			
				- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tersusun sesuai standar	4 Dok	4			
	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian		Program pelayanan administrasi umum Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		95,23			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD	1 Dok	1			
			Program pelayanan administrasi umum	- Jumlah Dokumen perencanaan dan pengelolaan kegiatan/keuangan PD	6 Dok	6			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	6 Dok	6			
				- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	12 Dok	12			
				- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	12 Dok	12			
				- Jumlah Belanja sarana dan prasarana aparatur	15 jenis	15			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program peningkatan perekonomian daerah	- Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	13 jenis	13			
			Pengembangan perekonomian daerah	Prosentase pelaksanaan rekomendasi TPID Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD		96,39			
				- Jumlah dokumen pelaporan Ekuinda, TPID dan TPAKD	11 Dok	11			
				- Jumlah Dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT	12 Dok	12			
			Pembinaan BUMD dan BLUD	- Jumlah Perusda dengan hasil audit WTP	5 Perusda	5			
	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat		82,15			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				daerah					
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD	7 Dok	7			
			Program pelayanan administrasi umum	- Tersedianya honorarium PNS pengelola kegiatan/keuangan PD	5 Org	5			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	12 Dok	12			
				- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	12 Dok	12			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah belanja sarana dan prasarana aparatur	14 Jenis	14			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	- Jumlah sarana dan prasarana aparatur kantor yang tersedia	4 Unit	4			
			Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Prosentase penyusunan program pembangunan daerah yang tepat waktu Prosentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu		87,56			
				- Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah (Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS Setda)	4 Dok	4			
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan PD	12 Dok	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Jumlah dokumen pelaporan kegiatan BanGub	1 Dok	1			
				- Jumlah dokumen LKJiP/SAKIP, LPPD, LKPJ Setda	3 Dok	3			
	Sekretariat Daerah Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		86,41			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	8 Dok	8		melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan	
			Program pelayanan administrasi umum	- Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	10 Org	10			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Uang Lembur PNS dan Non PNS	19 Org	19			
				- Jumlah alat tulis kantor, listrik dan elektronik, jasa surat menyurat, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bacaan dan peraturan perundangan, cetak dan penggandaan	81 Jenis	81			
				- Jumlah jasa tenaga protokol, dan jasa pengelola dokumentasi	4 Org	4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah	- Jumlah makanan dan minuman pegawai	25 Org	19			
				- Jumlah perawatan kendaraan bermotor	8 Unit	7			
				- Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	19 Jenis	13			
				Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			88,39		
				- Jumlah Pelayanan Kunjungan dan Pelaksanaan koordinasi Kepala	1 Dok	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				Daerah/ Wakil Kepala Daerah					
			Fasilitasi komunikasi dan informasi pimpinan daerah	- Jumlah Jasa Penghargaan (Plakat Lambang Daerah)	100 Bh	100			
			Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah	- Jumlah Belanja Cetak untuk kebutuhan Keprotokolan	10 Jenis	10			
			Fasilitasi komunikasi dan informasi pimpinan daerah Program pelayanan administrasi umum Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah Karangan Bunga	116 Bh	116			
				- Jumlah Fasilitasi Komunikasi (Rapat Pimpinan/ Rapim), Coffee Morning Pimpinan dan insan media	20 Kali	3			
				- Jumlah Publikasi Media Cetak	5000 mmk	5000			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Publikasi Media Elektronik	1 Kali	-			
				- Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS	5 org	19			
	Sekretariat DPRD			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		87,18		1. Lebih meningkatkan capaian kinerja	
				- Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD, LKPJ, LKjIP dan LPPD	100%	100		2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan	
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarana prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur	100%	100			
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi		69,26			
			Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	- Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD	214 kali	148			
			Peningkatan kapasitas DPRD	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	169 kali	200			
			Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	- Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Perundang-undangan dan Penyusunan Produk Hukum	12 Perda	18			
			Program penyelenggaraan kehumasan	persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan		96,09			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol	- Terlaksananya Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol	113 Kali	229			
	Kecamatan Kaliwungu		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80,92			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa Laporan Bulanan, LPPD, LKJiP,LRA, LKPJ,Laporan Triwulan, Laporan Semester.	6 Dok	8			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	99			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100%	82			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		97,6			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100%	88			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	100%	90			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	100%	87			
	Kecamatan Kota		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		90,19			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa laporan Bulanan, LPPD, LKJiP, LRA, LKPJ, Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran	8 Dok	8			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		97,72			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	25 Des/Kel	25			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	26 Des/Kel	25			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	27 Des/Kel	25			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	28 Des/Kel	25			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	29 Des/Kel	25			
	Kecamatan Kota Kelurahan Purwosari		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		98,67			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dok	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program pelayanan administrasi umum	- Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, RKPD, KUAPPAS, RKA, DPA, DPPA, LKPD dan laporan lainnya	8 Dok	8			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersediannya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	6 Bln	6			
				- honorarium pengelola keuangan	5 Org	5			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Belanja Uang Lembur Pegawai	5 Org	8			
				- Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	6 bln	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Belanja Barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perundang-undangan	7 jenis	7			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Belanja Perawatan peralatan gedung kantor (ac 4 unit, printer 7 unit, laptop 7 unit, dan komputer 3 unit	21 unit	21			
				- Belanja Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (Pengantiaan suku cadang dan kendaraan bermotor roda dua, service dan perpanjangan stnk kendaraan roda dua sebanyak 4 unit dan becak motor sampah 1 unit.	5 unit	5			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Belanja Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	4 jenis	4			
				- Honor PHD, TKP (Tenaga Kontrak Perorangan), Pembantu Modin, dan premi asuransi	5 Org	5			
				- Belanja makanan dan Minuman pegawai rapat dan tamu	3 jenis	3			
				- Belanja ATK	44 jenis	44			
				- Belanja komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4 jenis	4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Belanja peralatan Kebersihan	21 jenis	21			
				Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		98,19			
				- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi kelurahan	6 Bln	6			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	- Pembinaan 44 RT dan 9 RW	1 Orgn	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Pembinaan LPMK	1 Orgn	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan	6 Bln	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			rakyat di kelurahan	desa dan kesejahteraan rakyat					
				- Musrenbang Kelurahan	1 Kali	1			
				- Belanja kegiatan organisasi Kepemudaan	1 Orgn	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Rehabilitasi Jalan, Gorong- gorong) kelurahan	1 Pkt	1			
				- Pembinaan organisasi Perempuan (PKK)	1 Orgn	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Belanja Cermin Jalan	3 Bh	3			
				- Pelatihan keterampilan (dana Kelurahan)	6 Kgt	6			
				- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraank etentrman dan ketertiban umum	6 Bln	6			
				- Pembinaan KST / Linmas	1 Orgn	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum di kelurahan	- Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas	1 Jenis	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan	6 Bln	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	desa dan kesejahteraan rakyat					
				- Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Gorong - gorong dikelurahan	2 Pkt	2			
				- Pembelian Alat Timbangan Posyandu Balita dan Lansia	18 Unit	18			
	Kecamatan Kota Kelurahan Sunggingan		Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan) Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	100%	96,48			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya Dokuman Perencanaan dan Pelaporan : Renja, Renstra, LKPJ, LKJIP, LPPD, KUAPPAS , RKA dan DPA	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		97,22			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	1 Orgn	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (Dana Kelurahan)	13 Jenis	13			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	1 Org	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat (DAU Kelurahan)	3 Jneis	3			
	Kecamatan Kota Kelurahan Panjunan		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		86,08			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya Dokumen laporan RKA, DPA, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ	7 Dok	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya Administrasi dan pelaporan Keuangan	12 Bln	12			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya pelayanan Administrasi dan laporan Keuangan	12 Bln	12			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	12 Bln	90,76			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	12 Bln	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di	12 Bln	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				Kelurahan					
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bln	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kelurahan	12 Bln	12			
	Kecamatan Kota Kelurahan Wergu Wetan		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	8 Dok	89,35			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LKJIP, Renja, Renstra, KUA PPAS	12 Bln	8			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 Bln	12			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bln	12			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		96,84			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kelurahan	12 Bln	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat di Kelurahan	12 Bln	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bln	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat (DAU Kelurahan)	12 Bln	5			
	Kecamatan Kota Kelurahan Wergu Kulon		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		92,54		1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah dibuat	
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, RKPD, KUAPPAS, RKA, DPA, DPPA, LKPD dan laporan lainnya	8 Dok	8		2. Membuat perencanaan kegiatan yang lebih baik	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan,	12 Bln	12			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bln	12			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		95,2			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	12 Bln	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kelurahan	12 Bln	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bln	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembanguan desa dan kesejahteraan rakyat (DAU Kelurahan)	12 Bln	12			
	Kecamatan Kota Kelurahan Mlati Kidul		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		91,68			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD, KUA/PPAS, LKjIP, LKPJ, LPPD dan laporan semester / tahunan lainnya	10 Dok	10			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	6 Bln	6			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	14 Kgt	14			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		98,06			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya pembinaan organisasi kemasyarakatan 19 rt 3 rw	23 Orgn	23			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan Kegiatan Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan seni budaya	6 Kgt	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	6 Bln	6			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- Terlaksannannya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	3 RW	3			
	Kecamatan Kota Kelurahan Mlati Norowito		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	100%	92,95		1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah dibuat	
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya Renstra, RKPD, KUA/PPA, Renja, RKA, LPPD, CALK dan Laporan lainnya	100%	100		2. Membuat perencanaan kegiatan yang lebih baik	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya honorarium pengelola keuangan, uang lembur	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100%	100			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		97			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat kelurahan	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- Terlaksananya Pembangunan Jalan, Jembatan dan Saluran	100%	100			
	Kecamatan Kota Kelurahan Kerjasan		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		5,75			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan: : renja, rkp, lkpj, lkjip, lppd, rka, dpa, laporan lainnya	100%	100			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	100%	15,62			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		77,66			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	1 Orgn	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	3 RW	3			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Orgn	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat (DAU kelurahan)	3 RW	3			
	Kecamatan Kota Kelurahan Kejaksen		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		91,13			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- tersusunya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra,Renja,RK PD,LKPJ,LKJIP,LP PD dan Laporan lainnya	10 Dok	10			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100%	100			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		95,67			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				di kelurahan					
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	- fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	100%	100			
	Kecamatan Jati		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		90,73			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- jumlah dokumentasi perencanaan evaluasi dan pelaporan yg tersusun sesuai standar	12 Dok	12			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- jumlah pengelola keuangan	120Org	10			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		90,55			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan	90 Org	90			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- jumlah fasilitasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	1 Kali	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- jumlah fasilitasi kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yg dilaksanakan	1 Kali	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- menurunnya jumlah trantibum dari masyarakat	1 Kali	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- jumlah ajuan yang pelayanannya terlayani sesuai ketentuan	12 Bln	12			
	Kecamatan Undaan		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		92,55			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Meningkatnya akuntabilitas manajemen kinerja	5 Dok	5			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah pengelola keuangan	12 Bln	12			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai standart	70%	92			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		90,43			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	16 Des/Kel	16			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	17 Des/Kel	16			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	18 Des/Kel	16			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	19 Des/Kel	16			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	20 Des/Kel	16			
	Kecamatan Mejobo		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		97,76			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun sesuai standart	8 Dok	8			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- jumlah pengelola keuangan	20 Org	19			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Prosentase Layanan Dokumen Kepegawaian seuai standar	3 Jenis	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		99,46			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Pelatihan	11 Des/Kel	11			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Jumlah Fasilitasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	11 Des/Kel	11			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- Jumlah Fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	11 Des/Kel	11			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Menurunnya jumlah aduan Trantibum dari masyarakat	11 Des/Kel	11			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- Jumlah ajuan pelayanan yang terlayani sesuai ketentuan	11 Des/Kel	11			
	Kecamatan Jekulo		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		93,11			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan (Renja,LKJIP,PK,P K,LKPJ,LPPD,Kud us dalam angka,RKPD,KUA PPA, laporan Keuangan	7 Dok	7			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar	4 Dok	4			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100%	100			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		93,1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desayang dilaksanakan	12 Des/Kel	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Jumlah fasilitasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	12 Des/Kel	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	12 Des/Kel	1			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Pelaksanaan fasilitasi Festival Seni dan Budaya	12 Des/Kel	1			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- Jumlah fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	12 Des/Kel	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Des/Kel	12			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- Jumlah sosialisasi administrasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan	12 Des/Kel	1			
	Kecamatan Bae		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		85,7			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan : Renstra, Renja, RKPD, LKPJ, Lakip/LKJiP, LPPD, Laporan Bulanan Kecamatan dan Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD	9 Dok	9			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersediannya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bln	12			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		86,78			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Des/Kel	10			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat	- Fasilitasi kegiatan sosial pembinaan UMKM dan pameran pembangunan, Fasilitasi MTQ tingkat Kecamatan	10 Des/Kel	10			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Fasilitasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10 Des/Kel	10			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Umum	10 Des/Kel	10			
	Kecamatan Gebog		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		97,61			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan Pelaporan : Renstra, Renja, RKPD, LKJiP, LPPD, Laporan keuangan Semesteran, Laporan Keuangan akhir Tahun dan Ikhtisar realisasi keuangan	12 Dok	12			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	12 Bln	12			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	11 Des/Kel	98,98			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100%	11			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan umum	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
	Kecamatan Dawe		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		96,22			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Aparatur	100%	100			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100%	100			
			Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	18 Des/Kel	95,18			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	18 Des/Kel	18			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				desa					
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	18 Des/Kel	18			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	18 Des/Kel	18			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100			
			Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	- Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	100%	100			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.32 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Administrasi Pemerintahan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada

Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.179.451.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 184.651.644.775.

➤ Permasalahan:

- a. Masih Rendahnya Tata Kelola Keuangan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kudus
- b. Adanya pembatasan kegiatan dan transfer lgsg ke penyedia sehingga banyak penyedia yg tdk mau, hanya menerima tunai
- c. Pembatasan dan pengurangan kegiatan tertentu sehubungan dengan pandemi Covid-19
- d. kondisi pandemi covid_19 mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
- e. Dinamisnya kegiatan di DPRD sehingga yang sudah terencana kadang tertunda

➤ Solusi:

- a. Adanya koordinasi dan peningkatan tata kelola kuangan yang baik di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kudus
- b. Koordinasi dan Peningkatan Tata Kelola Keuangan yang Baik di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kudus
- c. Mengkoordinasikan dengan penyedia jasa dengan adanya metode pembayaran ke rekening bank penyedia jasa
- d. Untuk pekerjaan fisik perencanaan dibuat di akhir periode, untuk mengakomodir kegiatan di perubahan anggaran
- e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar personil di Bagian Adbang dan antar perangkat daerah terkait
- f. membuat skema pelaksanaan fasilitasi kegiatan lebih detail melalui adaptasi dg kondisi pandemi covid_19
- g. Membuat perencanaan yang lebih akurat

2. Urusan Pengawasan

Tabel 3.33
Urusan Pengawasan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
2	Inspektorat Daerah	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		95,91			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai ketentuan	33 Dok	33			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			capaian kinerja						
			Program pelayanan administr asi umum	- Terkomunikasik annya hasil pengawasan kepada Pemangku Kepentingan melalui penyelenggaraa n Sidang Larwasda	300 Obyek	250			
			Peningkat an sistem perencana an, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Pelayanan administra si dan	- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			pelaporan keuangan Peningkat an kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur						
				- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	29 Dok	29			
				- Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	33 Org	33			
			Pelayanan administra si dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	16			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkat an kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Program Peningkat an Sistem Pengawas an Internal dan Pengendal ian Pelaksana an Kebijakan KDH Pelaksana an pengawasa n internal, penangana n kasus	- Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	49 Dok	49			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			dan evaluasi						
				- Jumlah aset yang terpelihara	100 Unit	100			
				persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK persentase aduan pungli		83,3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				<p>yang selesai ditindak lanjuti persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti nilai rata-rata maturitas SPIP PD persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM persentase realisasi progres PMPRB</p>					

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Realisasi PKPT	100%	71,07			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.33 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pengawasan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.917.367.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.937.790.285.
- Permasalahan:
- Solusi:

3. Urusan Perencanaan

Tabel 3.34
Urusan Perencanaan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		96,75			
			Peningkatan sistem perencanaan , evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	6 Dok	6			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD	1 Dok	1			
				- Penyediaan honorarium pengelola kegiatan	8 Org	8			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 Org	5			
				- Jumlah dokumen pengelolaan umum & kepegawaian yang tersusun sesuai standart	53 Dok	53			
				- Jumlah laporan kepegawaian bulanan yang tersusun sesuai standart	12 Dok	12			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara (jasa komunikasi, sumber daya air & listrik, jasa perelatan & perlengkapan kantor, jasa operasional/pemeli haraan & perijinan kendaraan dinas, pemeliharaan operasional kendaraan dinas)	31 Unit	31			
				- Jumlah PHD dan Jasa Tenaga Administrasi (Kontrak)	8 Org	8			
			Program perencanaan pembangun an daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Persentase konsistensi program RKPD ke		98,07			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				dalam APBD Persentase keterisian data/informasi					
			Penyusunan Perencanaan Pembanguna n	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dok	6			
			Penyusunan Evaluasi Pembanguna n	- Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	1 Dok	1			
			Penyusunan Data dan Informasi Pembanguna n	- Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 Dok	3			
			Sinkronisasi perencanaan pembanguna n daerah / SPPD(BanGu b)	- Jumlah kegiatan SPPD (Bankeu Provinsi Jateng/BanGub) yang terfasilitasi (PEL, SIPD, PMG, SDG`s,	5 Kgt	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				Penanggulangan Kemiskinan)					
			Program perencanaan Pemerintah dan sosial budaya	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya		96,39			
			Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Pemerintah n	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	1 Dok	1			
			Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	1 Dok	1			
			Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana		99,57			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			sumber daya alam	wilayah, ekonomi dan sumber daya alam					
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	- Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2 Dok	2			
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dok	1			
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 Dok	2			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.34 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Perencanaan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.953.843.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 7.608.495.951.
- Permasalahan:

➤ Solusi:

4. Urusan Keuangan

Tabel 3.35
Urusan Keuangan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
4	Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80,93			
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan	- Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai	32 Dok	32			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			pelaporan capaian kinerja	ketentuan					
			Pelayanan administra si dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	29 Dok	29			
			Peningkat an kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan dan Jumlah dokumen pengelolaan Aset yang tersusun sesuai ketentuan	65 Dok	62			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program peningkat an pendapata n daerah	persentase realisasi PAD		93,46			
			Optimalisa si, monitoring dan evaluasi pendapata n daerah	- Data realisasi pendapatan daerah OPD pengelola pendapatan (12 OPD)	12 OPD	12			
				- Data potensi PAD	1 Dok	1			
			Pendataan , pendaftara n dan pemelihar aan data pajak daerah	- data wajib pajak baru (WP)	15000 Obyek	15232			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				- Dokumen pemukhuran WP	1 Dok	1			
				- PAD Pajak Daerah	114, 4 Milyar	113,19			
			Fasilitasi penagihan dan penangan an keberatan pajak daerah	- Jumlah penyelesaian aduan keberatan pajak daerah	15 Kasus	25			
				- Jumlah piutang pajak yang tertagih	11,7 M	7,47			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Operasion al Pengelolaa n UPTD Pengelola Pajak Daerah	- Target PAD PBB	23,15 Miliar	31			
				- Target PAD BPHTB	22,74 Miliar	23			
			Program fasilitasi dan penyusun an anggaran daerah	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan		92,09			
			Fasilitasi dan penyusun an anggaran daerah	- Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	226 Dok	240			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			bidang Pemerinta han dan Sosial Budaya						
			Fasilitasi dan penyusun an anggaran daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	- Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	226 Dok	240			
			Program penatausa haan keuangan dan akuntansi daerah	rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan		91,91			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	- Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	8 Dok	8			
				- Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	2 Dok	2			
			Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi	- Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	8 Dok	8			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam						
				- Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	2 Dok	2			
			Program pengelolan perbendah araan daerah	capaian realisasi pembayaran belanja PD		78,23			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	- Jumlah SP2D yang sesuai standar	6954 Lbr	7902			
				- Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi	70 Lap	58			
			Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	- Dokumen Perbup tentang petunjuk pelaksanaan APBD	1 Dok	1			
				- Jumlah OPD yang memahami Juklak APBD	34 OPD	34			
			Program pengelolaan aset daerah	persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah		90,92			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				Daerah					
			Perencana an dan Analisis Kebutuha n Aset Daerah	- Dokumen Rencana Kebutuhan BMD dan Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD	2 Dok	4			
			Peningkat an manajeme n aset/bara ng daerah	- Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi aset dengan tertib	34 OPD	34			
			Pemanfaat an dan pemindaht anganan	- Jumlah pemanfatan aset daerah	403 Dok	403			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			barang milikdaera h\	- Dokumen Apraisal aset/barang daerah	4 Dok	4			
				- PAD pemanfaatan aset daerah	4,326 Milyar	10			
				- Dokumen Perjanjian pemanfaatan aset	403 Dok	403			

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.35 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Keuangan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.118.515.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 376.767.197.265.
- Permasalahan:
 - a. Tidak tercapainya target piutang pajak daerah dikarenakan pandemi covid-19 berimplikasi pada turunnya kemampuan membayar pajak dan berkurangnya kegiatan penagihan ke lapangan akibat adanya kebijakan pembatasan sosial dan Realisasi PAD

pemanfaatan aset daerah tidak mencapai target dikarenakan perjanjian sewa sudah habis masa berlakunya tapi belum ada perpanjangan lagi.

➤ Solusi:

- a. Pemutakhiran basis data tunggakan/piutang dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (IT).

5. Urusan Kepegawaian

Tabel 3.36
Urusan Kepegawaian

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas : - Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan - Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		78,88			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Peningkat an sistem perencana an, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerj a yang tersusun sesuai dengan standar	4 Dok	4			
			Pelayanan administra si dan pelaporan keuangan	- Tersusunnya dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai standar	100%	100			
			Peningkat an kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersusunnya dokumen pengelolaan SDM dan Aset sesuai standar	100%	100			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar		78,28			
			Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur	- Terselenggaranya pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai	450 Org	595			
			Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat	- Tertatanya penerbitan SK kenaikan pangkat pegawai	815 Bh	701			
			Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan		81,46			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				perilaku Persentase perangkat daerah yang taat terhadap pelaporan kepegawaian Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg					
			Penyeleng araan pembinaa n disiplin aparatur	- Terselenggarany a OPD yang mematuhi kode etik/aturan perilaku	34 OPD	40			
				- Terlaksananya Pembinaan Disiplin	3 Kali	3			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcom e	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			Pembangu nan/penge mbangan sistem informasi dan dokument asi kepegawai an	- Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg	5 Bh	5			

➤ Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.36 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Kepegawaian, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.331.218.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.026.932.790.

➤ Permasalahan: -

➤ Solusi: -

6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.37
Urusan Pendidikan Pelatihan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan		Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas : - Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP per tahun		70,24		

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
			n - Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia						
				Pengembangan aparatur	- Terwujudn ya Pejabat Eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetens i	35 Org	23		
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	- Terwujudn ya ASN yang memiliki	105 Org	107		

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
					sertifikat manajerial dan teknis				

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.37 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Pendidikan dan Pelatihan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.464.429.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.135.753.983.
- Permasalahan: -
- Solusi: -

7. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3.38
Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembang an Daerah	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	1 Dok	98,09			
			Penyusun an Penelitian dan Pengkajian	- Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 Dok	1			

			Pengembangan dan inovasi	- Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	1 Dok	1			
--	--	--	--------------------------	---	-------	---	--	--	--

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.38 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang dan urusannya. Dalam pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.490.000 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 126.045.600.
- Permasalahan: -
- Solusi: -

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis yang ditetapkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

3.2.1. Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 3.2.1

Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Surat Edaran Bupati Kudus	SE Bupati Kudus Nomor 440/0920/38.00/2020 tanggal 16 Maret 2020.	Peningkatan Kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.
2	Surat Edaran Bupati Kudus	SE Bupati Kudus Nomor 800/1566/26.00/2020 tanggal 24 Maret 2020.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus disease (Covid-19) di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Kudus.
3	Surat Sekretaris Daerah	Surat kepada Kepala OPD Nomor 910/1683/25.00/2020 tanggal 15 April 2020.	Rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa 50% serta belanja modal 50% guna dialihkan pencegahan, penyebaran dan penanganan corona virus disease (Covid-19) di kudas.
4	Surat Edaran Bupati Kudus	SE Bupati Kudus Nomor 800/1711/26.00/2020 tanggal 20 April 2020.	Perubahan kedua SE Bupati Kudus Nomor 800/1566/26.00/2020 tanggal 24 Maret 2020.
5	Instruksi Bupati Kudus	Instruksi Bupati Kudus Nomor 130/01/2020 tanggal 19 Mei 2020.	Pengaturan kegiatan masyarakat guna percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.
6	Surat Edaran Bupati Kudus	SE Bupati Kudus Nomor 800/2827/26.00/2020 tanggal 4 Juni	Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam tatanan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2020.	normal baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
7	Surat Bupati Kudus	Surat nomor 180/8343/04.00/2020 tanggal 3 September 2020.	Tindak lanjut Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020.
8	Surat Edaran Bupati Kudus	SE Bupati Kudus Nomor 800/3983/26.00/2020 tanggal 4 Juni 2020.	Perubahan SE Bupati Kudus Nomor 800/2827/26.00/2020 tanggal 4 Juni 2020.
9	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020.	Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.

3.2.2. Kebijakan Strategis RSUD dr Loekmono Hadi

Tabel 3.2.2
Kebijakan Strategis RSUD dr. Loekmono Hadi

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
2.	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2015	Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
3.	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Kudus yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil.
4.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/208/2011	Penerapan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
5.	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus No. 27 Tahun 2017	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.

3.2.3. Kebijakan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3.2.3

Kebijakan Strategis BPBD

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Surat Edaran Bupati Kudus	Surat Edaran Bupati Kudus Nomor:440/0920/38.00/2020 Tanggal : 16 Maret 2020	Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Kudus.
2.	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 360/40/2020 Tanggal : 16 Maret 2020	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang disebabkan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Kudus.
3.	Surat Edaran Bupati Kudus	Surat Edaran Bupati Kudus Nomor : 440/1016/38.00/2020 Tanggal : 20 Maret 2020	Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik Di Kabupaten Kudus.
4.	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 360/47/2020 Tanggal : 30 Maret 2020	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kudus.
5.	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 360/52/2020 Tanggal : 2 April 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kudus.
6.	Instruksi Bupati Kudus selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di	Instruksi Bupati Kudus Nomor : 130/01/2020 Tanggal : 19 Mei 2020	Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo" Guna Percepatan Penanganan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kudus.

	Kabupaten Kudus		
7.	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 360/93/2020 Tanggal : 29 Mei 2020	Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kudus.

3.2.4. Kebijakan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.2.4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus	Peraturan Daerah Kab. Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1. Masa berlaku KTP berlaku seumur hidup
			2. Pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS)
			3. Retribusi denda keterlambatan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dihapus

3.2.5. Kebijakan Strategis Dinas Sosial

Tabel 3.2.5
Kebijakan Strategis Dinas Sosial

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Pedoman pemberian Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten Kudus.	Peraturan Bupati No. 41 Th 2018 tanggal 31 Desember 2018	Pemberian santunan kematian kepada warga Kudus yang meninggal karena tua/sakit dan atau kecelakaan
2.	Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No. 41 Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten Kudus.	Peraturan Bupati No. 11 Thn 2020 tanggal 1 April 2020	Pemberian santunan kematian kepada warga Kudus yang meninggal karena tua/sakit dan atau kecelakaan
3.	Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang dilokasikan pada Dinsos P3A P2KB Kab. Kudus.	SK Bupati No. 900/178/2020 tanggal 15 September 2020	Bansos kepada Penyandang cacat, yatim piatu, Bedah Rumah 73 unit, Operasional panti sosial, janda pejuang
4.	Penetapan penerima dan besaran Bansos berupa uang yang dialokasikan dalam anggaran Perubahan APBD TA. 2020 pada Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus.	SK Bupati No. 900/248/2020 Tanggal 22 Desember 2020	Bansos untuk organisasi rehabilitasi penca 1 orgns (FKPCTI) dan Bedah Rumah 3 unit
5.	Penetapan PMI Kab. Kudus sebagai penerima Hibah berupa uang yang dialokasikan dalam Anggaran Perubahan TA 2020 pada Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus.	SK Bupati No. 900/247/2020 tanggal 22 Desember 2020	Hibah Kepada PMI Kab. Kudus
6.	Penetapan penerima dan besaran Bansos bagi	SK Bupati No.	Bansos kepada masyarakat Kudus terdampak

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Warga Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Bagi warga Masyarakat terdampak Corona Kab. Kudus Tahap I Tahun anggaran 2020.	900/69/2020 Tanggal 22 April 2020	pandemik corona Tahap I
7.	Penetapan penerima dan besaran Bansos bagi warga Masyarakat Kab. Kudus terdampak Corona Virus disease 2019 (Covid-19) yang bekerja di Jakarta dan tidak bisa pulang ke Kudus TA. 2020.	SK Bupati No. 900/88/2020 Tanggal 19 Mei 2020	Bansos kepada masyarakat Kudus terdampak pandemik corona di Jakarta tidak bisa pulang
8.	Penetapan penerima dan besaran Bantuan Sosial bagi warga Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) yang dialokasikan pada Dinas Sosial P3AP2KB Kab. Kudus Tahap II TA 2020	SK Bupati No. 900/95/2020 Tanggal 29 Mei 2020	Bansos kepada masyarakat Kudus terdampak pandemik corona Tahap II
9.	Penetapan penerima dan besaran Bansos bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap III dari alokasi Belanja Tidak terduga di Kab. Kudus TA. 2020.	SK Bupati 900/224/2020 Tanggal 25 Nopember 2020	Bansos kepada masyarakat Kudus terdampak pandemik corona Tahap III

3.2.6. Kebijakan Strategis Dinas Perhubungan

Tabel 3.2.6

Kebijakan Strategis Dinas Perhubungan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Surat edaran Bupati Kudus	Nomor : 800/4575/39.00/2020	Pelaksanaan protokol kesehatan perjalanan orang selama libur hari raya natal 2020 dan tahun baru 2021, serta kegiatan penyelenggaraan ibadah natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus disease 2019.
2	Surat edaran Bupati Kudus	Nomor : 800/1566/26.00/2020	Petunjuk teknis pelaksanaan sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19) dilingkungan instansi pemerintah kabupaten kudus.
3	Surat edaran Bupati Kudus	Nomor : 700/2766.1/08.00/2020	Pengendalian gratifikasi hari raya keagamaan dan hari raya besar lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten kudus.
4	Surat edaran Bupati Kudus	Nomor : 800/1728/26.00/2020	Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
5	Surat edaran Bupati Kudus	Nomor : 440/0920/38.00/2020	Peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi corona virus disease (covid-19) di kabupaten kudus.

3.2.7. Kebijakan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.2.7
Kebijakan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Surat Edaran Bupati Kudus	Surat Edaran Bupati Kudus Nomor : 440/0920/38.00/2020 tanggal 16 Maret 2020	Peningkatan Kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.
2	Instruksi Bupati Kudus	Instruksi Bupati Kudus Nomor : 130/01/2020 tanggal 19 Mei 2020	Pengaturan kegiatan masyarakat guna percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.
3	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020	Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.

3.2.8. Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 3.2.8

Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus.	Keputusan Bupati Kudus No. 504/102/2020.	Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan melalui PTSP dan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dilapangan, mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan per- Undang- Undang yang berlaku.
2	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Kerja Promosi Penanaman Modal di Kab. Kudus.	Keputusan Bupati Kudus No. 570/228/2020.	Untuk memberikan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Kab. Kudus yang meliputi urusan pemerintahan dan urusan penunjang perekonomian lainnya, perlu adanya promosi penanaman modal.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
3	Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan.	Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 8 Tahun 2020.	Dalam rangka kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Kabupaten Kudus serta guna menindaklanjuti Permendagri 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
4	Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal di Kab.Kudus.	Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 6 tahun 2020.	pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal adalah untuk menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanaman Modal maupun calon penanaman Modal.
			Memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal.
			Mendorong dan mengembangkan kawasan industri dan menguatkan pertumbuhan ekonomi.
5	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2017 tentang Penanaman Modal	Peraturan Bupati Kudus No. 40 Tahun 2020.	agar tersedia pedoman teknis dalam Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan kualitas Penanaman Modal yang efektif, efisien dan sinergi.
			Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
			Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang cepat mudah dan akuntabel

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas terintegrasi kepada masyarakat
6	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Perizinan terpadu online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus	Peraturan Bupati Kudus No. 43 Tahun 2020.	Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
			Untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat tepat, efisien, transparan dan akuntabel
			Untuk menjelaskan birokrasi yang rumit dan panjang, dan memberikan pelayanan yang tidak mengharuskan masyarakat datang.
7	Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Non Parizinan di Kab. Kudus	Peraturan Bupati Kudus No. 44 Tahun 2020.	Dalam rangka peningkatan kualitas dan menjamin Pelayanan Publik yang sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta untuk perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam pelayanan publik dilingkungan DPMPTSP Kab. Kudus.
8	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun	Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.	Untuk mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan baik secara online maupun

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	2018 tentang Pembarian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus.		offline serta adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang baru terbit serta perubahan beberapa norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan.

3.2.9. Kebijakan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.2.9

Kebijakan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Peraturan Bupati Kudus No. 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan Desa sebagaimana telah diubah	Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang	Tersedianya pedoman pembangunan Desa yang partisipasi dan berkesinambungan serta bersinergi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah.

	dengan perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.	Pedoman Pembangunan Desa.	
2	Peraturan Bupati Kudus No.36 Tahun 2020 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di desa.	Surat edaran Menteri Dalam Negeri tgl 29 Maret 2020 No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid 19.	Menyesuaikan ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan perkembangan terbaru.

3.2.10. Kebijakan Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tabel 3.2.10

Kebijakan Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan.	Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
		Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.	Meningkatnya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan per Tahun.
			Meningkatnya Koleksi Bahan Pustaka.
			Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas berbagai jenis perpustakaan
2	Meningkatnya tertib arsip perangkat daerah.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus.	Sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam melaksanakan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, serta alih media Arsip.
		Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang jadwal Retensi Arsip.	Memberikan petunjuk/pedoman bagi perangkat Daerah/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
		Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.	Sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip.

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang handal dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan.	Peningkatan peran PBG untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar	Penggunaan IT guru meningkat dalam proses pembelajaran
2	Perlu kajian yang komprehensif terhadap regrouping sekolah dalam rangka mengefisienkan anggaran, manajemen pengelolaan dan solusi dari	Regrouping sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Regrouping sesuai ketentuan yang berlaku

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	berkurang tenaga pendidik.		
3	Visi dan Misi Bupati yang menjadikan kudus sebagai kota yang religius, maka pendidikan moral dan keagamaan terhadap anak didik harus menjadi perhatian serius dalam pembelajaran.	Implementasi sikap spiritual dalam pembelajaran oleh guru mapel, guru BK dan guru kelas seperti budaya kegiatan beribadah bersama, mentoring keagamaan dan kebiasaan senyum sapa salam salim	
4	Pembangunan kolam renang yang membutuhkan anggaran yang besar namun fungsi dan pengelolaannya kurang jelas, agar untuk pembahasan anggaran tahun berikutnya perlu dicermati.		
5	Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang taruna, maka anggaran Program kepemudaan yang dulu ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sekarang ikut di Program Kegiatan Dinas Sosial P3AP2KB, sehingga dalam penganggaran Organisasi Kepemudaan perlu diperhatikan efek guna dan Manfaatnya.		
6	Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas telah tercapainya prestasi bidang pendidikan, baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional yang membawa harum nama Kabupaten	Mempertahankan prestasi	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	Kudus.		
7	Pelaksanaan Program Peningkatan peran serta kepemudaan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan melalui beberapa kegiatan antara lain pembinaan pemuda sehingga terbentuk pemuda yang mandiri yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial sekitarnya termasuk lingkungan alam.		
8	Pembinaan dan Pengembangan olah raga pendidikan agar dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional, melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru olah raga yang berkualifikasi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.	Pembangunan lapangan olahraga dan pengadaan alat peraga olahraga PJOK	Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui pembelajaran di sekolah dengan meningkatnya sarpras olahraga di sekolah. Hasil pembangunan 1 lapangan olahraga dan 11 sekolah penerima PJOK
9	Prestasi yang diraih putra-putri baik tingkat daerah Provinsi maupun tingkat nasional, Pemerintah daerah harus mengawal sebagai apresiasi atas prestasi yang diraihnya dan memberikan bantuan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.	Siswa berprestasi diberikan fasilitas pembinaan dan mendapatkan bonus	

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a.	Proses revisi Perda RTRW sangat penting karena sebagai salah satu acuan dalam pengembangan wilayah dan memberikan ketenangan serta jaminan masuknya investasi di Kabupaten Kudus, untuk itu agar proses tahapan revisi dilaksanakan lebih intensif dengan selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.	Demi kelancaran proses revisi Perda RTRW, kami telah menjalin komunikasi dan berkoordinasi baik dengan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian ATR/BPN. Dimana tahapan prosesnya sampai pada permohonan persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN.	Proses revisi Perda RTRW berjalan dengan lancar sehingga Perda RTRW segera dapat ditetapkan.
b.	Perencanaan pembangunan harus direncanakan matang dan komprehensif, ada aspek estetika dan keselamatan tidak asal-asalan dan dalam pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan penyediaan jasa mengerjakan sesuai batas waktu sehingga kualitas pekerjaan lebih baik.	Perencanaan pembangunan telah dilaksanakan melalui konsultan perencanaan tetntunya telah didasari dengan disiplin ilmu teknis dan survey lapangan dan mempertimbangkan estetika dan keselamatan.	Produk perencanaan sesuai yang diharapkan, pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan kualitas yang baik

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Dalam pelaksanaan kegiatan dipastikan penyedia jasa mengerjakan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada spesifikasi teknis yang diisyaratkan sehingga diperoleh pekerjaan yang berkualitas baik.	
c.	Keberadaan Pamsimas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan sarana air bersih, adanya beberapa Pamsimas yang mangkrak dan ada yang sudah berjalan tapi kualitas airnya tidak layak oleh karena itu agar dikelola dengan baik.	Pada tahun 2020 di Dinas PUPR tidak ada kegiatan Pamsimas karena adanya reconfusing covid-19 dan kegiatan Pamsimas diusulkan lagi TA. 2021.	Meminimalisasi Pamsimas yang mangkrak dan terpenuhinya kebutuhan air bersih/minum pada masyarakat.
		Untuk permasalahan Pamsimas yang mangkrak dan kualitas airnya tidak layak Dinas PUPR sudah berkoordinasi dengan tim Pamsimas dan BPSPAM sebagai pengelola Pamsimas desa untuk menangani permasalahan sumur magkrak, adapun sumur mangkrak disebabkan adanya sumber air payau dan untuk treatment penanganan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup banyak dan anggaran tersebut dari hasil pengelolaan Pamsimas tersebut.	
		Untuk kualitas air yang tidak layak Dinas PUPR sudah berkoordinasi dengan DKK dan sudah dilakukan pengecekan terhadap 100 titik Pamsimas.	

3. Dinas Pertanian dan Pangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
a.	Varietas-varietas asli dari Kabupaten Kudus agar lebih diperhatikan dan dikembangkan.	Telah ditindak lanjuti tahun ini dengan mengembangkan tanaman unggulan Kabupaten Kudus yaitu pemberian hibah tanaman alpokat, jambu citra, durian, kelengkeng, kopi, kelapa kopyor, dan vengkeh. Selain itu juga telah dilakukan pendaftaran varietas unggulan Kudus untuk komoditas duku sumber dan alpokat japan.	Pengembangan kawasan buah sesuai potensi dan perencanaan pengembangan daerah setempat.
b.	BBI yang sudah ada di Kabupaten Kudus agar dikelola lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan, selain seagai tempat pengembangan perikanan agar bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat wisata.	Wacana untuk wisata di BBI telah dimasukkan dalam rencana kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan, namun terbatasnya anggaran rencana tersebut belum bisa terwujud.	Sebagai wisata perikanan sekaligus untuk edukasi bidang perikanan.
c.	Pemerintah Kabupaten agar menyediakan alsintan disesuaikan dengan perluasan sawah yang ada, sehingga bisa memperoleh	Dinas Pertanian dan Pangan telah menyediakan alsintan baik untuk pengolahan maupun pasca panen untuk dipinjam pakai,	Mencukupi kebutuhan alsintan guna meningkatkan produksi dan mengurangi biaya produksi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	hasil pertanian yang lebih optimal.	selain itu juga setiap tahun mengusulkan bantuan alsintan melalui anggaran APBN.	
d.	Penyampaian bantuan hibah/petani/kelompok tani agar diketahui Kepala Desa setempat.	Semua bantuan hibah diawali dengan mengajukan proposal yang diketahui Kepala Desa, selain itu kami lengkapi juga dengan berita acara serah terima yang di ketahui oleh Kepala Desa setempat.	Koordinasi dan keterbukaan proses pemberian hibah.
e.	Tenaga Penyuluh Pertanian agar leih meningkatkan pembinaan/pendampingan terhadap petani yang tidak hanya mengelola padi, jagung, kedelai, dan sejenisnya, termasuk pembinaan terhadap bidang perikanan.	Semua tenaga penyuluh wajib memberikan pendampingan ke semua sektor pertanian dan perikanan, bahkan untuk bidang perikanan ada penyuluh khusus perikanan dari pusat yang ditempatkan di daerah.	Meningkatkan produksi hasil perikanan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.
f.	Untuk meningkatkan penghasilan petani dibutuhkan pendampingan yang inten kepada para kelompok tani di masing-masing desa sehingga mampu mengolah, memasarkan hasil tanam mereka.	Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan pendampingan secara inten kepada kelompok tani baik kelompok pembudidaya maupun pengolah hasil pertanian oleh penyuluh pertanian maupun tenaga teknis dari masing-masing bidang yang ada.	Peningkatan kapasitas petani dan fasilitasi akses-akses usaha.
g.	Pemberian bantuan-bantuan bibit diupayakan tidak hanya berupa bibit padi, jagung, kedelai/pohon-pohon tanaman keras namun bisa berupa empon-empon (jahe, kencur, kunyit dll).	Ditindaklanjuti tahun ini dengan pemberian bantuan jahe, jamur tiram, porang, padi organic sekaligus pembuatan demplot.	Peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan lahan dibawah tegakan.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Penanaman Modal			
1.	Berdasarkan Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 24 Perka BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bahwa DPMPTSP telah melaksanakan kewajibannya dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan.	Kegiatan pemantauan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	
		Kegiatan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan Penanaman Modal, kewajiban penyampaian LKPM dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha (pendampingan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin operasional).	
		Kegiatan pengawasan melalui kunjungan lapangan guna pemenuhan tanggung jawab dan Kewajiban Pelaku Usaha untuk	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Penanaman Modal			
		melengkapi perizinan yang menjadi kewajibannya serta evaluasi terhadap indikasi terjadinya pelanggaran.	
2.	Bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Mencabut dan/atau merevisi peraturan di tingkat daerah yang tidak sesuai dan/atau tidak selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	
		Menyusun dan menetapkan peraturan tentang penanaman modal yang mendukung pelaksanaan penanaman modal di daerah.	
		Mengusulkan norma-norma kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Presiden tentang Daftar Prioritas Investasi, sehingga dapat terintegrasi dengan system <i>Online Single Submission</i> (OSS).	
	Berdasarkan Pasal 12 dan Lampiran I Permendag No. 8 Tahun 2020 bahwa Bidang Usaha Toko Swalayan masuk kategori Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan prosedur pemenuhan komitmen Izin Usaha Tipe 2, yaitu izin usaha dengan persyaratan teknis.	Memiliki hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki RDTR wilayah atau zonasi (dikecualikan untuk minimarket);	
		Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Penanaman Modal			
		berwenang bagi bagi daerah yang belum memiliki RDTR wilayah atau zonasi	
		Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.	
3.	Guna penertiban cafe/karaoke yang masih buka menjelang bulan Ramadhan dan dalam rangka pencegahan COVID-19, DPMPTSP tetap melakukan koordinasi dengan SatPol PP dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus terhadap perizinan berusaha yang telah terbit.		

5. Dinas Perhubungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perubahan waktu jam buka tutup di jalan jenderal sudirman dan pengadaan bus sekolah bagi pelajar di wilayah yang tidak terjangkau transportasi.	Perubahan waktu jam buka tutup di jalan Jenderal Sudirman yang dari arah pentol sampai Alun-Alun Kudus sudah diberlakukan waktu dua arah kendaraan, yang semula boleh melintas dua arah maksimal jam 06.00 pagi di rubah menjadi jam 07.00 pagi sehingga bias membantu pengalihan arus menghindari kemungkinan adanya kemacetan.	
		Pengadaan Bus Sekolah bagi pelajar yang tidak terjangkau transportasi, untuk saat ini sekolah dalam menerima murid baru telah melaksanakan Rayonisasi sehingga jarak tempuh tidak terlalu jauh, kami sampaikan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus telah menerima bantuan bus sekolah dari Kementerian perhubungan sejumlah 2 (dua) bus yang sampai saat ini belum ada berita acara penyerahannya, dimana 1 (satu) bus untuk bantuan sekolah dan bus yang kedua merupakan Reward atas keberhasilan memperoleh dan mempertahankan penghargaan Wahana Tata Nugraha Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2019. Dinas perhubungan Kabupaten Kudus sudah berkonsultasi ke Bidang Aset pada Badan pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus bahwa sebelum ada berita acara serah terima bus, maka belum bisa dikatakan sebagai Aset Daerah, saat ini berita acara serah terima bus sedang dalam proses.</p>	
2.	<p>Kajian dan evaluasi terkait potensi pendapatan yang sebenarnya dan inovasi terkait pengelolaan parkir seperti aplikasi e-parkir.</p>	<p>Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tahun 2019 telah mengadakan kajian potensi parkir dan kami tindak lanjuti pada tahun 2020 dengan terobosan inovasi study banding ke Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan parkir berlangganan dimana prosesnya memerlukan jangka waktu yang panjang dan perlu adanya kajian dari aspek Ekonomi, Sosial, Budaya dan pertimbangan-pertimbangan yang akurat lainnya</p>	

6. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Penataan aset daerah agar lebih dimaksimalkan.	Telah dilaksanakan inventarisasi BMD tahun 2019	Tercapainya tertib Administrasi pengelolaan barang milik Daerah
2	Bekas gedung Ngasirah	Terkait eks Gedung Ngasirah telah dilakukan koordinasi dengan investor	Lahan eks gedung Ngasirah dapat dioptimalkan manfaatnya.
3	Eks matahari Mall Kudus/Kudus Plaza	Terkait eks gedung kudus plaza telah dilaksanakan lelang bongkaran eks gedung kudus plaza tanggal 7 Desember 2020 dan pembongkarannya selesai tanggal 20 Februari 2021.	Lahan eks gedung Kudus Plaza dapat dioptimalkan manfaatnya.
4	Pemerintah Kabupaten Kudus agar segera menyusun perda-perda atau perubahan Perda tentang pajak dan retribusi untuk menyesuaikan dengan	Pemkab Kudus senantiasa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perda-Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pada tahun 2020, tidak diterbitkan	Memberikan respon fiskal untuk meringankan beban masyarakat dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	perkembangan zaman.	perda mengenai pajak karena Perda yang ada dipandang cukup untuk merespon dinamika perkembangan yang ada. Khusus terkait respon fiskal atas pandemi Covid-19 untuk membantu meringankan beban masyarakat diterbitkan Perbub mengenai P D R B dalam rangka mengatasi dampak bencana.	
5.	Pemerintah Kabupaten Kudus agar meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak/retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.	Selama tahun 2020, Pemkab Kudus selalu berusaha meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan berbagai cara, antara lain: 1. Kegiatan Sosialisasi PBB P2 kepada seluruh desa di pendopo yang dipimpin langsung oleh Pit. Bupati Kudus; 2. Kerja sama dengan BPN untuk peningkatan kepatuhan pembaya~PHTB; 3. Kerja sama dengan Bank Jateng untuk memudahkan pembayaran pajak melalui pengembangan saluran pembayaran PDRD; 4. Sosialisasi dan pemasangan alat pemantau transaksi secara elektronik (<i>tapping box</i>); untuk jenis Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Hiburan; 5. Metode-metode sosialisasi lain dalam bentuk spanduk, reklame, media sosial, dan sebagainya.	Meningkatkan PAD melalui peningkatan kesadaran membayar pajak.
6.	Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih	Terkait penerimaan daerah yang bersumber	Peningkatan kesadaran

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	meningkatkan pembinaan kepada petugas parkir/pengelola parkir khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak/retribusi.	dari perparkiran, beberapa langkah yang dilakukan adalah: 1. Peninjauan lapangan ke beberapa kantong parkir; 2. Pembinaan kepada para juru parkir di pendopo; 3. Evaluasi dan koordinasi secara berkala.	petugas/pengelola parkir sebagai ujung tombak penerimaan daerah dari perparkiran.

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Urusan Kebudayaan		
a.	Untuk melestarikan budaya Kudus diantaranya situs patiyam agar disosialisasikan kepada para Pelajar dan masyarakat secara umum.	Pengelolaan koleksi Museum Situs Purbakala Patiyam (Terlaksana).	Mengkaji dan mengkonservasi fosil koleksi Museum Situs Purbakala Patiyam didampingi tenaga ahli dari BPSMP sangiran
		Sosialisasi Museum Situs Purbakala Patiyam (Terlaksana).	Menyampaikan informasi dan gambaran tentang profil Museum Situs Purbakala Patiyam dan lingkup koleksinya
		Edukasi Lomba Lintas Medan Jelajah Purbakala Patiyam (Tidak Terlaksana karena Pandemi Covid).	Pengenalan dan Edukasi tentang Situs Purbakala Patiyam kepada Pelajar

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Urusan Kebudayaan		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Situs Purbakala Patiayam (Terlaksana).	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Situs Purbakala Patiayam (Perbaikan Mabelair dan Taman)

Urusan Pariwisata		
a.	<p>Potensi Pariwisata Kabupaten Kudus dengan Anugerah Kearifan Lokal ada dua Sunan yaitu Sunan Kudus dengan Peninggalan Menara Kudus, Sunan Muria yang terletak di Gunung Muria yang khas perkebunan ada kopi Muria, Parijoto, Peninggalan Purbakala Gatling, Waduk Logung, ada juga wayang Klitik wonosoco di gunung Kendeng Kecamatan Undaan masih banyak potensi yang berkelas nasional wajib dikelola sebagai anugerah illahi, untuk sebagai pendapatan asli daerah pengembangan pariwisata perlu di buat tahapan "MasterPlan" dengan sinergitas OPD lain, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta OPD yang mendukung pelaksanaan peningkatan Pariwisata Kudus, Infrastruktur penunjang Pariwisata yang sangat diperlukan seperti jalan, drainase, penerangan, Keramahan Masyarakat dengan visi dan misi Kudus Modern dan Religius, semua ini bisa terwujud asal ada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Master Plan" Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kudus telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang RIPPARKAB Kudus Tahun 2020-2035. 2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kudus telah dan akan dilaksanakan <ul style="list-style-type: none"> - RIPPARKAB menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035. - Dalam RIPPARKAB, Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Industri Pariwisata 4. Kelembagaan Kepariwisata - Pada Tahun 2019-2020 telah dilaksanakan sinergitas dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengembangan Pariwisata Kabupaten Kudus, antara lain pada kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Kopi Muria 2. Pembinaan Komunitas Kopi Muria 3. Launching dan promosi wisata agro kopi 4. Revitalisasi saluran drainase di destinasi wisata museum kretek dan desa wisata kaliputu 5. Pengelolaan parkir wisata Menara Kudus 6. Proses perizinan destinasi wisata yang terkait wilayah sungai dan bendungan logung ke balai besar wilayah sungai (BBWS) Semarang - Konsep Sinergitas dengan Perangkat Daerah terkait yang akan dilaksanakan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)

niatan bersama-sama.		Kudus Tahun 2020-2035.
----------------------	--	------------------------

8. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Maintenance/perawatan secara berkala LPJU yang mati agar ditingkatkan.	Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan LPJU yang mati telah dilakukan secara rutin oleh tenaga pemeliharaan LPJU yang terbagi dalam 3 shift setiap hari.	Kondisi Sarpras/armada hirolis yang sudah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar serta berdampak juga terhadap keselamatan para petugas.
			Ketersediaan material LPJU yang terbatas disbanding dengan lampu yang mati, sebelum tersedianya material upaya yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki/reparsi ulang lampu-lampu yang sudah mati sehingga dapat dipergunakan kembali.
			Lampu lpju banyak yang hilang atau pecah, upaya yang dilakukan yaitu dengan memasang alat pantau LPJU dibeberapa ruas jalan yang rawan sekaligus untuk memantau secara online kondisi LPJU pada ruas jalan tersebut.
2.	Pendapatan rusunawa dari target sudah terlampaui tapi kinerja pelayanan kurang memuaskan dan karena itu agar lebih ditingkatkan dalam pelayanannya.	Pelayanan pada rusunawa telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Perda Kab.Kudus Nomor 3 tahun 2018 tentang pemakaian kekayaan daerah, pemberian	Terdapat salah satu gedung digunakan untuk kegiatan penanganan covid-19 karantina pemudik pada tahun 2020 sehingga

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pelayanan rusunawa meliputi Keamanan, kebersihan, fasilitas (air, listrik, fasum) dan pemeliharaan gedung.	penghuni tersebut dipindahkan ke gedung lain serta diberikan pagar pembatas dan sekarang belum digunakan kembali untuk sewa penghuni karena dimungkinkan untuk digunakan dalam kondisi covid.
			Penghuni yang melanggar aturan ditertibkan sesuai dengan ketentuan dan aturan pemakaian surunawa yang berlaku.
Urusan Lingkungan Hidup			
1	Urusan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan pengelolaan sampah, TPA Tanjungrejo sudah mulai penuh oleh karena itu perlu adanya upaya serius penanganan pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan plastik, organik, non organik, B3.	TPA Tanjungrejo sudah mulai penuh sehingga perlu adanya upaya serius untuk penambahan lahan. Dana pengadaan tanah untuk TPA Tanjungrejo telah diusulkan dalam APBD tahun 2021, namun terkendala peraturan terbaru bahwa dana cukai tidak diperbolehkan untuk penggungan pengadaan tanah sehingga anggaran tersebut belum dapat terealisasi pada tahun 2021.	Sebagai upaya mendesak penanganan pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sampah dimulai dari sumbernya yaitu pemilahan sampah rumah tangga meliputi sampah plastik, organik, non organik dan B3. Dalam hal ini kami telah bekerjasama dengan pihak Pegadaian mengadakan program sampah jadi emas, hasil pemilahan sampah tersebut dapat bernilai ekonomis untuk masyarakat melalui tabungan emas di pegawaian.

9. Dinas Kesehatan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
----	----------------------------	---------------	--

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur semakin ditingkatkan dan didukung dengan dana BOK yang didapat oleh puskesmas, dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pemeriksaan ibu hamil sesuai standar dengan edukasi langsung kepada ibu hamil melalui kelas ibu hamil.	<p>Kelas ibu hamil sudah dilaksanakan di tahun 2020 dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bae: 5 kelas • Mejobo: 7 kelas • Rendeng : 7 Kelas • Ngemplak :7 Kelas • Jekulo : 8 Kelas • Dawe : 9 Kelas • Dersalam : 5 Kelas • Jepang : 10 Kelas • Kaliwungu : 12 Kelas • Tanjungrejo : 12 Kelas • Gribig : 13 Kelas • Sidorekso : 15 Kelas • Gondosari : 27 Kelas • Purwosari : 19 Kelas • Rejosari :m 24 Kelas • Wergu Wetan : 8 Kelas • Undaan: 30 Kelas • Ngembal Kulon: 56 Kelas • Jati : 48 Kelas <p>Total Kab. Kudus: 321 Kelas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua ibu hamil mengikuti kelas ibu • Ibu hamil memahami tentang permasalahan kehamilan, persalinan dan nifas, serta bayi baru lahir (BBL)
2	Pelayanan kesehatan usia produktif masih 13%, sedangkan standar pelayanan kesehatan usia produktif masuk dalam kegiatan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Menyarankat kepada Puskesmas untuk mengoptimalkan Posbindu. • Mengadakan Posbindu di 	Peningkatan capaian pelayanan kesehatan usia produktif pada tahun 2020 dari 13% menjadi 100%.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang merupakan program baru di Dinas Kesehatan dimana saran dan prasarana belum ada dan juga belum ada tugas puskesmas yang dilatih Pandu PTM untuk melakukan shining kesehatan sesuai standar, sehingga perlu dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.	<p>Institusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan BHP untuk melengkapi giat Posbindu di DKK dan Puskesmas. 	
3	Pelayanan kesehatan ODGJ (orang Dengan Gangguan Jiwa) berat ditingkatkan dengan pendataan ODGJ dalam program PIS-PK sehingga ODGJ yang ditemukan bias mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar.	Monitoring dan evaluasi program PIS-PK setiap 1 bulan sekali	Menumbuhkan kesadaran anggota keluarga yang mempunyai ODGJ untuk rutin melakukan pengobatan dan komunikasi dengan Dokter Psikiatri setiap 1 bulan sekali.
4	Untuk meningkatkan capaian jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (Tuberculosis) sesuai standar adalah dengan melakukan penyisiran data di Rumah Sakit, Mengurangi under reporting kasus TBC di Rumah Sakit, Pengecekan duplikasi kunjungan berdasarkan rekam medis dengan data aplikasi SITT dan melakukan jejaring di klinik dokter praktek mandiri dalam upaya	Sudah dilakukan penyisiran data ke semua Rumah Sakit di Kabupaten Kudus dan melakukan bridging sistem SITB dan SIM RS. Menyusun Perbup No. 47 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberculosis di Kabupaten Kudus tahun 2020-2024.	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk meningkatkan capaian jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Tuberculosis (TB) sesuai standar. • Permasalahan Pada tahun 2020, jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Tuberculosis (TB) sesuai standar belum memenuhi target, karena penurunan target dari Provinsi terkait proses penjarangan suspect Tuberculosis (TB) beresiko terhadap penularan (droplet invection) terutama di era pandemi Covid-19.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	penanggulangan TB.		

10. Dinas Perdagangan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	Dalam upaya pencegahan covid-19, semua pasar daerah (pasar kliwon, bitingan, jember, pasar baru, pasar piji, pasar kalirejo) disetiap pintu utama agar disediakan sarana cuci tangan dan betul betul dijaga oleh satgas.	Sarana cuci tangan sudah disediakan disetiap pintu utama dan dijaga oleh petugas pada pasar kliwon, bitingan, jember, pasar baru, pasar piji, pasar kalirejo	Untuk pencegahan berkembangnya covid-19
2.	Dalam menghadapi bencana covid-19 ini, pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat membebaskan pembayaran retribusi untuk semua pedagang tradisional selama 3 bulan.	Selama 3 bulan yaitu april s/d juni pedagang dibebaskan pembayaran retribusi pelayanan pasar dan kebersihan.	Untuk meringankan pedagang dimasa pandemi karena profit pedagang yang menurun.
3.	Identifikasi demain dan suply kebutuhan pokok berbasis data, mana yang sudah bisa dipenuhi dari daerah Kudus dan mana yang masih disuply dari luar daerah.	Yang dipenuhi dari dalam daerah: <ul style="list-style-type: none"> - Telur 20% - Daging Ayam 100% - Daging Sapi 40% - Cabe 5% - Sayur 0% 	Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
		<ul style="list-style-type: none"> - Gula 20% Yang di suply dari luar daerah: - Beras 80% - Minyak 100% - Kedelai 100% 	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

4.1.1. Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Kementerian) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di **tabel 4.1.1** berikut:

Tabel 4.1.1
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM

N O.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KE T.
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kementerian Ketenagakerjaan RI	DIPA Nomor : SP DIPA-026.04.4.03 9498/2020, Tanggal 21 Juli 2020	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus	Rp. 576.390.000,-	Rp. 543.000.000,-				
			Outcome :								
			Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang								

			Ditempatkan dan Diberdayakan								
			Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja								
			Keluaran (Output) : 1. Wirausaha Baru 2. Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui sistem padat karya								
			Rincian Kegiatan : 1. Padat Karya Infrastruktur	1. Desa Glagah Kulon, Mejobo, Tumpang		Rp. 151.500.000,-	Rp. 127.900.000,-	84,42	60 orang	100	

			2. Tenaga Kerja Mandiri	Krasak. 2. TKM Desa Tergo, Mejobo, Ngembal Kulon, Tumpang Krasak, Fattayat NU Kec Gebog, Muslimat NU Kec Jekulo	Rp. 424.890.000,-	Rp. 415.100.000,-	97,64	1. Pembekalan dan pemberian bantuan sarana usaha 120 orang 2. Administrasi 5 layanan	100	
--	--	--	-------------------------	---	-------------------	-------------------	-------	---	-----	--

4.1.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Bawahannya

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kudus tidak memberikan penugasan tugas pembantuan kepada Pemerintah bawahan (Pemerintah Desa).

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Informasi adanya anggaran/DIPA tugas pembantuan dari kementerian teknis baru diperoleh pada saat tahun anggaran telah berjalan sehingga tidak ada anggaran pendampingan dari APBD.
2. Kegiatan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan belum sinkron dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
3. Belum tersosialisasinya mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan kepada kementerian teknis.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Disamping LKPJ tersebut Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), serta menginformasikan kepada Masyarakat melalui media publik dalam bentuk Ringkasan LPPD.

Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen- dokumen perencanaan pembangunan setahun sebelumnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini pula, disampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus akan lebih berkomitmen dan terus berbenah diri meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari DPRD dan *stakeholders* sangat diharapkan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 ini disusun dan disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.